

**DIKTAT
SEJARAH PENDIDIKAN II**



Oleh:

Dyah Kumalasari, M.Pd

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2009**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, maka diktat Sejarah Pendidikan II ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tujuan penulisan diktat ini adalah guna membantu kelancaran pembelajaran khususnya untuk Mata Kuliah Sejarah Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY.

Dalam diktat Sejarah Pendidikan II ini memuat materi tentang konsep dasar pendidikan, Sejarah Pendidikan di Indonesia sejak masa pengaruh Hindu Budha, pengaruh Islam, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sampai dengan datangnya Bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, seperti bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.

Penulis mengakui masih banyak kekurangan disana-sini dalam penulisan diktat ini. Masih banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan lagi. Untuk itu, penulis tetap mengharapkan beragam saran, masukan, maupun kritik yang membangun dari para pembaca. Demikian harapan dari penulis, semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sejarah Pendidikan. Demi kelancaran dan terlaksananya proses pembelajaran yang lebih baik.

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Dasar Pendidikan

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan (Ngalim Purwanto, 2002:11). Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara masalah pendidikan meliputi cakupan yang cukup luas, bahkan dalam mendefinisikan pengertian pendidikan juga bervariasi. Ada yang mengartikan pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di lingkungan masyarakat dimana ia berada. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (contoh paling nyata sekolah) sehingga yang bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal (*Dictionary of Education* dalam T. Sulistyono, 2003).

Dari beberapa definisi tersebut menunjukkan melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, melihat dari sudut pandang psikologis, dan yang kedua dari sudut pandang sosiologis. Banyak sudut pandang untuk dapat merumuskan pengertian pendidikan sehingga banyak juga definisi tentang pendidikan. Namun demikian, yang jelas bahwa pendidikan adalah proses untuk membina diri seseorang dan masyarakat agar dapat *survive* dalam menjalani hidupnya.

B. Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan

Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Rumusan konstitusional tersebut apabila dicermati menegaskan bahwa arah dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani, cakap, berilmu, dan kreatif, mengembangkan kemandirian serta menjadi warga negara yang baik. Ini semua dalam rangka membangun watak bangsa yang beradab dan bermartabat.

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut sangat ideal dan komprehensif, bahkan bisa dikatakan yang terlengkap di dunia. Rumusan tujuan pendidikan tersebut adalah untuk memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap komponen manusiawi yang terkait dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita yang ideal itu. Dijelaskan pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, butir 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi menurut amanat UU No. 20 Tahun 2003 ini, peserta didik harus didorong untuk aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan yang implikasinya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Aliran-aliran dalam Pendidikan

Makna pendidikan sangat luas, dan setiap orang dengan pandangan tertentu merumuskan arti pendidikan berbeda dari rumusan pendidikan yang dirumuskan seseorang ahli dengan pandangan yang lain. Begitu pun kalau secara khusus kita kuatkan dengan proses pendidikan sebagai proses pembinaan peserta didik sebagai subjek didik. Dalam hal ini memang ada beberapa aliran dalam pendidikan:

1. Aliran Nativisme

Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer (Jerman: 1788-1860). Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir; pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Potensi yang dibawa sejak lahir atau pembawaan inilah yang sepenuhnya mempengaruhi perkembangan

anak, yang baik akan menjadi baik, dan yang jelek akan menjadi jelek. Menurut kaum nativisme tersebut, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan, sehingga percuma saja kita mendidik, atau dengan kata lain pendidikan tidak diperlukan. Dalam ilmu pendidikan hal ini disebut *pesimisme pedagogis*.

2. Aliran Empirisme

Tokoh dari aliran ini adalah John Locke (Inggris: 1632-1704). Pandangan aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya, atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan dan atau lingkungannya. Dalam artian, bahwa manusia dapat dididik menjadi apa saja (ke arah yang baik maupun sebaliknya), menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama *optimisme pedagogis*. Dalam hal ini pendidik memegang peranan yang sangat penting dengan menyediakan lingkungan pendidikan dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman (*empiri*: pengalaman).

3. Aliran Naturalisme

Tokoh aliran ini adalah JJ. Rousseau (Prancis: 1712-1778). *Nature* artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir senada dengan aliran nativisme, maka aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak (manusia) sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh/pendidikan itu baik, akan menjadi baik, tapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini JJ. Rousseau: "...semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pendipta, tetapi semua menjadi rusak di tangan manusia". Artinya, anak hendaknya dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya, manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya.

4. Aliran Konvergensi

Tokoh dari aliran ini adalah William Stern (Jerman: 1871-1939), yang berpendapat bahwa anak sejak lahir telah membawa pembawaan atau potensi-potensi, namun dalam perkembangan selanjutnya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikan. pembawaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan pendidikan dan atau lingkungan. Sebaliknya pendidikan dan

atau lingkungan tidak akan berhasil baik manakala pada diri anak tidak ada pembawaan yang mendukungnya. Menurut Stern, pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan, seakan ada dua garis lurus yang menuju ke suatu titik temu (*convergen*: menuju ke suatu titik). Aliran konvergensi pada umumnya dapat diterima secara luas, walaupun masih ada juga beberapa kritik terhadapnya.

Aliran konvergensi dikritik sebagai aliran yang cocok untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kalau bibitnya baik dan lingkungannya baik maka hasilnya pasti baik. Padahal bagi manusia hal itu belum tentu, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu pilihan atau seleksi dari yang bersangkutan.

5. Tut Wuri Handayani

Konsep ini berasal dari Ki Hadjar Dewantara, seorang pakar pendidikan Indonesia, sekaligus pendiri Perguruan Taman Siswa. Tut Wuri Handayani berasal dari bahasa Jawa, “Tut Wuri” berarti “mengikuti dari belakang”, dan “handayani” berarti “mendorong, memotivasi, atau membangkitkan semangat”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran ini mengakui adanya pembawaan, bakat, maupun potensi-potensi yang ada pada anak sejak lahir. Dengan kata “tut wuri” berarti pendidik diharapkan dapat melihat, menemukan, dan memahami bakat atau potensi-potensi apa yang timbul dan terlihat pada anak didik, untuk selanjutnya dapat dikembangkan dengan memberikan motivasi atau dorongan ke arah pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi-potensi tersebut.

Dibandingkan dengan keempat aliran pendidikan yang telah dibahas sebelumnya, tut wuri handayani lebih mirip dan dekat dengan aliran konvergensi dari William Stern, yang berpendapat bahwa perkembangan anak (manusia) ditentukan oleh bagaimana interaksi antara pembawaan atau potensi-potensi yang dimiliki anak yang bersangkutan dan lingkungan ataupun pendidikan yang mempengaruhi anak dalam perkembangannya. Dengan kata lain, sifat-sifat dan ciri-ciri anak (manusia) dalam perkembangannya ada yang lebih ditentukan oleh pembawaannya, dan ada pula yang lebih ditentukan oleh lingkungannya, tergantung kepada mana yang lebih dominan dalam interaksi antara keduanya.

Tut wuri handayani merupakan bagian dari konsep kependidikan Ki Hadjar Dewantara yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Ing ngarso sung tulodo

Ing madyo mangun karso

Tut wuri handayani

Ing ngarso sung tulodo artinya jika pendidik sedang berada didepan maka hendaklah memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. *Ing ngarso*: di depan, *sung*: asung = memberi, *tulodo*: contoh/teladan yang baik. *Ing madyo mangun karso* berarti jika pendidik sedang berada di “tengah-tengah” anak didiknya, hendaknya ia dapat mendorong kemauan atau kehendak mereka untuk berinisiatif dan bertindak. *Ing madyo*: di tengah; *mangun*: membangun, menimbulkan dorongan; *karso*: kehendak atau kemauan. Ditambah dengan *tut wuri handayani* yang telah diuraikan sebelumnya, maka ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh.

BAB II

AKTUALISASI PENDIDIKAN PADA MASA PENGARUH HINDU-BUDHA

A. Pendahuluan

Pendidikan pada hakikatnya untuk membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelenggaraan pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari internal maupun eksternal system pendidikan. faktor-faktor di luar system pendidikan yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan rakyat.

Selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia, aspek pendidikan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Munculnya Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan nusantara pada masanya dengan berbagai karya agung yang masih dapat kita temukan hingga saat ini hingga merdekanya bangsa ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan pada masa itu. Di samping itu, pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari yang semula hanya diperuntukkan untuk kalangan agamawan dan bangsawan, hingga pendidikan yang merata untuk semua kalangan. Inilah perjalanan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu dan tokoh yang mewarnainya.

B. Masa Pra Hindu-Budha

Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Budha, kebudayaan Indonesia asli pada kira-kira 1500 SM disebut kebudayaan neolitik (neo = baru), yang sisa-sisanya banyak kita jumpai di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi (A. Ahmadi, 1987: 10).

Ciri-ciri dari kebudayaan neolitik adalah bahwa kebudayaan tersebut termasuk kebudayaan maritim (ada hubungan dengan laut). Kepercayaan yang dianut pada saat itu adalah Animisme dan Dinamisme. Animisme adalah kepercayaan akan sakti roh nenek moyang. Roh ini sangat dipuja karena orang beranggapan bahwa nenek moyanglah yang mewariskan dan melindungi adat. Mereka percaya bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada penunaian kewajiban orang seorang, yakni adat. Dinamisme artinya mempercayai adanya kekuatan gaib (mana) pada setiap benda, baik pada benda hidup maupun benda mati. (I. Djumhur, 1976:103).

1. Sistem Masyarakat

Masyarakat saat itu bersifat gotong-royong, akrab, dan statis, karena di dalamnya belum terdapat perbedaan-perbedaan kelas. Orang-orang tinggal bersama-sama dalam masyarakat-masyarakat kecil dan dipimpin oleh ketua adat yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Budha, ketua adat ini kelak dijadikan raja.

2. Sistem Pengetahuan

Dalam Koentjaraningrat (2000) dikatakan bahwa setiap suku bangsa di dunia mempunyai pengetahuan, di antaranya: tentang alam sekitarnya; tubuh manusia; sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia; ruang dan waktu; dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang alam misalnya pengetahuan tentang musim-musim, sifat dan gejala alam, bintang-bintang, dan sebagainya. Pengetahuan tentang tubuh manusia adalah pengetahuan yang luas tentang ciri-ciri tubuh manusia, letak dan susunan urat-urat, dan sebagainya. Hal ini terwujud dalam kemampuan pengobatan tradisional yang seringkali menggunakan ilmu gaib.

3. Sistem Pendidikan

Dengan sistem pengetahuan yang dimiliki seperti tersebut di atas, pada waktu itu pendidikan dalam lingkungan keluarga sudah mencukupi kebutuhan, karena masyarakat masih serba bersahaja. Yang menjadi pendidik adalah ayah dan ibu. Ayah mengajarkan pengetahuan yang dimiliki kepada anak laki-laki dan ibu terhadap anak perempuannya. Yang dianggap memiliki kecakapan istimewa saat itu adalah pandai besi dan dukun, mereka diberi gelar Empu. Pandai besi adalah seorang yang ahli dalam pengetahuan duniawi, sedangkan dukun adalah ahli dalam pengetahuan maknawiah. Para empu dapat juga disebut sebagai Guru, karena merekalah yang berperan sebagai guru.

Tujuan pendidikan pada masa itu adalah anak-anak dipersiapkan agar kelak dapat memegang kekuasaan dalam masyarakat sebagai manusia yang mempunyai kecakapan istimewa. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia yang mempunyai semangat gotong-royong; menghormati para empu; dan taat kepada adat. Kepala adat memegang peranan segala-galanya.

B. Masuknya Pengaruh Hindu-Budha

Pengaruh Hindu mulai masuk ke Indonesia setelah terjadinya hubungan perdagangan antara orang-orang Indonesia dengan para pedagang Hindu (Teori Van Leur

dalam I. Djumhur, 1976). Hubungan dagang tersebut terjadi antara para pedagang India dengan para ketua adat, golongan kaya yang mampu melakukan perdagangan karena mempunyai modal yang besar. Dari para pedagang inilah informasi tentang keadaan di India didapatkan. Gambaran pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Raja dengan dukungan dari kasta Brahmana, raja menikmati segala kebahagiaan hidup dan mempunyai status istimewa.

Kenikmatan yang tergambar dari cerita para pedagang India tersebut, serta keinginan untuk mencari hubungan diplomatik dengan luar negeri untuk memperlancar perdagangan, mendorong ketua adat untuk mendatangkan brahmana untuk mengatur negaranya, sehingga ketua adat dalam waktu yang singkat dinobatkan dan disyahkan menjadi raja yang berkuasa seperti dengan kedudukan raja di India. Dari keraton inilah mulai masuknya kebudayaan Hindu ke dalam masyarakat Indonesia dan mempengaruhi kebudayaan kuno.

Setelah masuknya pengaruh Hindu, susunan masyarakat menjadi masyarakat feodal, melahirkan dua golongan manusia:

1. Golongan kasta Brahmana dan Ksatria, yaitu para raja dan pegawai-pegawainya (kasta yang dijamin oleh rakyat); dan
2. Golongan kasta waisya dan sudra, yaitu golongan rakyat biasa (golongan yang menjamin golongan pertama).

Raja dan pegawai-pegawainya mempunyai tingkatan yang jauh lebih tinggi dari rakyat biasa serta menguasai daerah yang luas termasuk rakyatnya. Oleh Brahmana, raja dinyatakan sebagai wakil dari Syiwa, Syiwa menjelma menjadi raja.

Dalam paham Hindu, manusia hidup dalam samsara (perpindahan jiwa yang tak berkeputusan). Ia tidak dapat melepaskan diri dari keduniawian. Manusia tetap hidup di dunia ini, setelah mati dilahirkan kembali. Manusia berasal dari debu, kemudian melalui tingkat-tingkat: debu – tanaman – hewan – syudra – waisya – ksatria – brahmana – moksha (dapat bersatu dengan Syiwa). Untuk mencapai moksha dapat dicapai dengan cara bertapa.

Dalam kepercayaan Budha, hidup itu merupakan penderitaan. Manusia harus mencari jawaban tentang arti dan makna hidup yang lebih banyak mengandung duka daripada suka. Untuk memecahkan itu dengan delapan usaha: kepercayaan; pertimbangan; perkataan; perbuatan; penghidupan; usaha; samadi; dan persatuan pikiran yang positif. Sehingga manusia berada dalam keadaan nirwana (sepi dari kehendak). Dalam Budha tidak ada pembagian kasta.

Syiwaisme dari Hinduisme dan Budhisme sebagai dua agama yang berbeda di Indonesia dalam pertumbuhannya secara berdampingan nampak adanya kecenderungan “syncretisme”, yaitu keyakinan untuk mempersatukan figur Syiwa dan Budha sebagai satu sumber yang maha tinggi. Perwujudan dari syncretisme tersebut tercermin dalam semboyan pada lambang negara kita, “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai salah satu bait dari syair Sotasoma karangan Empu Tantular dari jaman Majapahit. Maknanya adalah, Syiwa dan Budha adalah dewa-dewa yang diperbedakan (Bhinna) tetapi dewa-dewa itu Ika (tunggal), hanya satu (Ary H. Gunawan, 1995:5).

Situasi Pembelajaran

Para Brahmana menggantikan posisi Empu di Indonesia, mereka berperan sebagai guru. Brahmana menjadi manusia istimewa, para empu belajar kepada mereka. Setelah itu empu-empu tersebut menjadi guru dan mengganti kedudukan brahmana.

Saat itu ada 2 macam guru:

1. Guru Keraton : golongan yang dijamin
2. Guru Pertapa : menginsyafi tugasnya

Murid-murid dari guru keraton ini terdiri dari anak-anak raja dan bangsawan. Sedangkan guru-guru pertapa sifatnya lebih kerakyatan. Pada prinsipnya mereka mendekati rakyat dan menjauh dari keraton dengan bersembunyi di hutan-hutan untuk menghindari perselisihan dengan kaum bangsawan. Tujuannya adalah mengangkat derajat rakyat jelata. Untuk ke depannya peran para guru pertapa ini sangat penting dalam penyebaran agama Islam.

Empu dan guru dianggap sebagai orang yang sakti. Empu bersakti dan guru dianggap sudah dapat mendekati moksha. Sistem pendidikan yang dijalankan disesuaikan dengan cara di India yaitu sistim guru-kula (asrama). Murid-murid tinggal serumah dengan guru, istri guru dianggap sebagai ibu. Di sini murid juga wajib melayani gurunya, karena guru dianggap sebagai orang yang sakti dan selamanya dihormati. Sebagai guru tidak mempunyai penghasilan yang tetap, hanya sewaktu-waktu menerima pemberian sukarela dari para orang tua murid.

Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram Lama, dan sebagainya mendasarkan pendidikannya pada agama Budha, dengan tujuan tiap-tiap orang yang beragama Budha supaya menjadi manusia yang sempurna dan dapat masuk nirwana. Dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dipegang oleh kaum brahmana. Adapun kurikulum yang diajarkan adalah isi dari buku agama Budha yaitu

Upanishad (sebagai buku suci). Sedangkan guru yang terkenal saat itu adalah Darmapala. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah murid-murid menghafalkan dan diberi buku pelajaran untuk dihafalkan sampai benar-benar menguasai. Kepada mereka diajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat umum dan religius. Sifat pendidikan dan pengajaran tidak dilaksanakan secara formal, sehingga tiap murid dimungkinkan untuk berpindah dari guru yang satu kepada guru yang lain dalam meningkatkan dan memperdalam pengetahuannya. Para bangsawan, ksatria, serta pejabat kerajaan lainnya biasa mengirimkan anak-anaknya kepada para guru untuk dididik atau para guru tersebut yang diminta datang ke istana untuk mengajar anak-anak mereka.

Pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan keagamaan, pemerintahan, strategi perang serta ilmu kekebalan dan kemahiran menunggang kuda dan memainkan senjata tajam.

Pada abad-abad terakhir menjelang jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, sistem pendidikan tidak lagi dijalankan secara besar-besaran seperti sebelumnya, tetapi dilakukan oleh para guru kepada siswa dalam jumlah terbatas dalam padepokan (asrama).

Beberapa karya peninggalan jaman Hindu yang terkenal adalah:

1. Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa (Kediri, 1019);
2. Bharata Yudha, karya Empu Sedah (Kediri, 1157);
3. Hariwangsa, karya Empu Penuluh (Kediri, ± 1125);
4. Gatotkacasraya, karya Empu Penuluh (Kediri, ±1125);
5. Smaradhahana, karya Empu Dharmaja (Kediri, ±1125);
6. Negara Kertagama, karya Empu Prapanca (Majapahit, ±1331-1389);
7. Arjunawiwaha, karya Empu Tantular (Majapahit, ±1331-1389);
8. Sotasoma, karya Empu Tantular (Majapahit, ±1331-1389);
9. Pararaton, yang merupakan karya sejarah sejak berdirinya Kediri sampai jatuhnya Majapahit.

Secara singkat kondisi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa Hindu dan Budha disajikan pada tabel berikut (Sutari, 1983):

Komponen Pendidikan	Masa Hindu	Masa Budha
Dasar falsafah dan tujuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Falsafah: agama - Membekali kaum atasan agar dapat melaksanakan tugas-tugas penyuluhan kepada masyarakat dengan baik - Membekali rakyat agar menghormati Siwa dan Raja - Mendewasakan individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Falsafah: agama - Sangat bersifat individu, yaitu Ahimsa yang berarti sabar dan anti penganiayaan - Mempersiapkan operator kapal - Mempersiapkan pedagang ulung
Kurikulum/isi dan sistem pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Ajaran Lingga, yaitu anjuran untuk menghormati kekuasaan Siwa dan Raja karena dianggap sebagai wakil Mahadewa di dunia - Baca tulis dan life skill, yaitu pada masa Tarumanegara 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajaran Ahimsa - Teknik operator - Perdagangan - System pembelajaran kelompok dan individual
Kelembagaan dan organisasi		<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat khusus mendidik calon pendeta Budha di sekitaran Borobudur - Sekolah dagang di wilayah Siwijaya - Universitas Nalanda
Karakteristik pendidik dan peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan bangsawan - Rakyat jelata 	Golongan bangsawan

Kesimpulannya, pendidikan pada waktu itu telah teratur dengan baik dan pendidikan pada waktu itu mengutamakan budi pekerti dan kesusilaan. Di bawah pimpinan Sanjaya, Mataram mengalami kemakmuran. Dalam masa itu kepustakaan Jawa Kuno telah berkembang. Tentang perkembangan pendidikan dan pengajaran di jaman Kediri dan Majapahit, Hayam Wuruk memperhatikan tentang pengajaran di asrama para Brahmana. Dikatakan pada waktu itu bahwa Majapahit memiliki sebuah perpustakaan yang besar yang dinamakan “Sana Pustaka” yang berisi buku-buku berharga karya para pujangga. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa pada abad itu telah ada pendidikan di dalam dan di luar sekolah atau di asrama-asrama.

BAB III

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PENGARUH ISLAM

A. Pendahuluan

Berkembangnya kerajaan Islam di nusantara pada abad ke-13 Masehi juga menimbulkan pengaruh kepada dunia pendidikan. Bisa dikatakan sistem pendidikan pada masa Islam merupakan bentuk akulturasi antara sistem pendidikan patapan Hindu-Buddha dengan sistem pendidikan Islam yang telah mengenal istilah *uzlah* (menyendiri). Akulturasi itu tampak pada sistem pendidikan dimana guru dan murid berada dalam satu pemukiman yang disebut pesantren. Selain itu pada umumnya pesantren jauh dari pemukiman penduduk, keramaian masyarakat, dan juga kota-kota besar.

Sistem pendidikan yang ada pada masa Hindu-Buddha kemudian berlanjut pada masa Islam. Bisa dikatakan sistem pendidikan pada masa Islam merupakan bentuk akulturasi antara sistem pendidikan *patapan* Hindu-Buddha dengan sistem pendidikan Islam yang telah mengenal istilah *uzlah* (menyendiri). Akulturasi tersebut tampak pada sistem pendidikan yang mengikuti kaum agamawan Hindu-Buddha, saat guru dan murid berada dalam satu lingkungan permukiman (Schrieke, 1957: 237; Pigeaud, 1962, IV: 484—5; Munandar 1990: 310—311). Pada masa Islam sistem pendidikan itu disebut dengan pesantren atau disebut juga pondok pesantren. Berasal dari kata *funduq* (*funduq*=Arab atau *pandokheyon*=Yunani yang berarti tempat menginap).

Bentuk lainnya adalah, tentang pemilihan lokasi pesantren yang jauh dari keramaian dunia, keberadaannya jauh dari permukiman penduduk, jauh dari ibu kota kerajaan maupun kota-kota besar. Beberapa pesantren dibangun di atas bukit atau lereng gunung Muria, Jawa Tengah. Pesantren Giri yang terletak di atas sebuah bukit yang bernama Giri, dekat Gersik Jawa Timur (Tjandrasmita, 1984—187). Pemilihan lokasi tersebut telah mencontoh "gunung keramat" sebagai tempat didirikannya *karsyan* dan *mandala* yang telah ada pada masa sebelumnya (De Graaf & Pigeaud, 1985: 187).

Seperti halnya *mandala*, pada masa Islam istilah tersebut lebih dikenal dengan sebutan "depok", istilah tersebut menjadi nama sebuah kawasan yang khas di kota-kota Islam, seperti Yogyakarta, Cirebon dan Banten. Istilah *depok* itu sendiri berasal

dari kata *padepokan* yang berasal dari kata *patapan* yang merujuk pada arti yang sama, yaitu “tempat pendidikan. Dengan demikian padepokan atau pesantren adalah sebuah sistem pendidikan yang merupakan kelanjutan sistem pendidikan sebelumnya.

Namun kedatangan penjajah di Indonesia sedikit banyak telah menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa itu. Pendidikan dianggap dapat menimbulkan benih-benih perlawanan di kalangan rakyat sehingga pemerintah kolonial menghambat pendidikan di Indonesia pada masa itu.

B. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia

1. Kerajaan Islam di Aceh

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh (Taufik Abdullah, 1983: 4). Berdasarkan kesimpulan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 – 20 Maret 1963, yaitu:

- a. Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, dan langsung dari Arab;
- b. Daerah yang pertama kali didatangi oleh Islam adalah pesisir Sumatera, adapun kerajaan Islam yang pertama adalah di Pasai;
- c. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut aktif mengambil peranan dan proses penyiaran Islam dilakukan secara damai;
- d. Keterangan Islam di Indonesia, ikut mencerdaskan rakyat dan membawa peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia (Taufik Abdullah, 1983: 5)

Tentang masuknya Islam ke Indonesia ada yang mengatakan dari India, dari Persia, atau dari Arab. (Musrifah, 2005: 10-11). Dan jalur yang digunakan adalah:

- a. Perdagangan, yang mempergunakan sarana pelayaran
- b. Dakwah, yang dilakukan oleh mubaligh yang berdatangan bersama para pedagang, para mubaligh itu bisa dikatakan sebagai sufi pengembara.
- c. Perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim, mubaligh dengan anak bangsawan Indonesia, yang menyebabkan terbentuknya inti sosial yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim.
- d. Pendidikan. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam.

- e. Kesenian. Jalur yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam terutama di Jawa adalah seni.

Bentuk agama Islam itu sendiri mempercepat penyebaran Islam, apalagi sebelum masuk ke Indonesia telah tersebar terlebih dahulu ke daerah-daerah Persia dan India, dimana kedua daerah ini banyak memberi pengaruh kepada perkembangan kebudayaan Indonesia. Dalam perkembangan agama Islam di daerah Aceh, peranan mubaligh sangat besar, karena mubaligh tersebut tidak hanya berasal dari Arab, tetapi juga Persia, India, juga dari Negeri sendiri.

Ada dua faktor penting yang menyebabkan masyarakat Islam mudah berkembang di Aceh, yaitu:

- a. Letaknya sangat strategis dalam hubungannya dengan jalur Timur Tengah dan Tiongkok.
- b. Pengaruh Hindu – Budha dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang tidak begitu berakar kuat dikalangan rakyat Aceh, karena jarak antara Palembang dan Aceh cukup jauh. (A. Mustofa, Abdullah, 1999: 53)

Sedangkan Hasbullah mengutip pendapat Mahmud Yunus, memperinci faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat cepat tersebar di seluruh Indonesia (Hasbullah, 2001: 19-20), antara lain:

- a. Agama Islam tidak sempit dan berat melakukan aturan-aturannya, bahkan mudah ditiru oleh segala golongan umat manusia, bahkan untuk masuk agama Islam saja cukup dengan mengucapkan dua kalimah syahadat saja.
- b. Sedikit tugas dan kewajiban Islam
- c. Penyiaran Islam itu dilakukan dengan cara berangsur-angsur sedikit demi sedikit.
- d. Penyiaran Islam dilakukan dengan cara bijaksana.
- e. Penyiaran Islam dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami umum, dapat dimengerti oleh golongan bawah dan golongan atas.

Konversi massal masyarakat Nusantara kepada Islam pada masa perdagangan terjadi karena beberapa sebab (Musrifah, 2005: 20-21), yaitu:

- a. Portilitas (siapa pakai) sistem keimanan Islam.
- b. Asosiasi Islam dengan kekayaan. Ketika penduduk pribumi Nusantara bertemu dan berinteraksi dengan orang muslim pendatang di pelabuhan, mereka adalah pedagang yang kaya raya. Karena kekayaan dan kekuatan ekonomi, mereka bisa memainkan peranan penting dalam bidang politik dan diplomatik.

- c. Kejayaan militer. Orang muslim dipandang perkasa dan tangguh dalam peperangan.
- d. Memperkenalkan tulisan. Agama Islam memperkenalkan tulisan ke berbagai wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar belum mengenal tulisan.
- e. Mengajarkan penghapalan Al-Qur'an. Hapalan menjadi sangat penting bagi penganut baru, khususnya untuk kepentingan ibadah, seperti sholat.
- f. Kepandaian dalam penyembuhan. Tradisi tentang konversi kepada Islam berhubungan dengan kepercayaan bahwa tokoh-tokoh Islam pandai menyembuhkan. Sebagai contoh, Raja Patani menjadi muslim setelah disembuhkan dari penyakitnya oleh seorang Syaikh dari Pasai.
- g. Pengajaran tentang moral. Islam menawarkan keselamatan dari berbagai kekuatan jahat dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Melalui faktor-faktor dan sebab-sebab tersebut, Islam cepat tersebar di seluruh Nusantara sehingga pada gilirannya nanti, menjadi agama utama dan mayoritas negeri ini. Berikut adalah beberapa Kerajaan Islam di Aceh.

a. Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai, yang didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik Al-Shaleh dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Syah (tahun 1444 M/ abad ke-15 H). (Mustofa Abdullah, 1999: 54)

Pada tahun 1345, Ibnu Batutah dari Maroko sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir, raja yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i, mengadakan pengajian sampai waktu sholat Ashar dan fasih berbahasa Arab serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana. (Zuhairini, et.al, 2000: 135)

Keterangan Ibnu Batutah tersebut dapat ditarik kesimpulan pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai sebagai berikut:

- 1) Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syari'at adalah Fiqh mazhab Syafi'i
- 2) Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis ta'lim dan halaqoh
- 3) Tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama
- 4) Biaya pendidikan bersumber dari negara. (Zuhairini, et.al., 2000: 136)

Pada zaman kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-14 M, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Mengutip keterangan Tome Pires, yang menyatakan bahwa “di Samudra Pasai banyak terdapat kota, dimana antar warga kota tersebut terdapat orang-orang berpendidikan” (M.Ibrahim, et.al, 1991: 61).

Menurut Ibnu Batutah juga, Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari jum'at tiba, Sultan sembahyang di Masjid menggunakan pakaian ulama, setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama, antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Ispahan.

Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut Majlis Ta'lim atau halaqoh. Sistem halaqoh yaitu para murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru.

b. Kerajaan Perlak

Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh. Rajanya yang pertama Sultan Alaudin (tahun 1161-1186 H/abad 12 M). Antara Pasai dan Perlak terjalin kerja sama yang baik sehingga seorang Raja Pasai menikah dengan Putri Raja Perlak. Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di Pantai Selat Malaka, dan bebas dari pengaruh Hindu.(Hasbullah, 2001: 29)

Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Cot Kala. Dayah disamakan dengan Perguruan Tinggi, materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantiq, ilmu falaq dan filsafat. Daerahnya kira-kira dekat Aceh Timur sekarang. Pendirinya adalah ulama Pangeran Teungku Chik M.Amin, pada akhir abad ke-3 H, abad 10 M. Inilah pusat pendidikan pertama.

Rajanya yang ke enam bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243-1267 M, terkenal sebagai seorang Sultan yang arif bijaksana lagi alim. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan Perguruan Tinggi Islam yaitu suatu Majlis Taklim tinggi dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan

membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i.(A.Mustofa, Abdullah, 1999: 54). Dengan demikian pada kerajaan Perlak ini proses pendidikan Islam telah berjalan cukup baik.

c. Kerajaan Aceh Darussalam

Proklamasi kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan Barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan Timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Syah diangkat menjadi Raja dengan Sultan Alaudin Ali Mughayat Syah (1507-1522 M).

Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan Kerajaan Aceh adalah Gampong (Kampung), yang dikepalai oleh seorang Keucik dan Waki (wakil). Gampong-gampong yang letaknya berdekatan dan yang penduduknya melakukan ibadah bersama pada hari jum'at di sebuah masjid merupakan suatu kekuasaan wilayah yang disebut mukim, yang memegang peranan pimpinan mukim disebut Imeum mukim.(M. Ibrahim, et.al., 1991: 75)

Jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah Meunasah (Madrasah). Yang berarti tempat belajar atau sekolah, terdapat di setiap gampong dan mempunyai multi fungsi antara lain:

- 1) Sebagai tempat belajar Al-Qur'an
- 2) Sebagai Sekolah Dasar, dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, Ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam.

Fungsi lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu
- 2) Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Al-Qur'an di bulan puasa.
- 3) Tempat kenduri Maulud pada bulan Mauludan.
- 4) Tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idhul Fitri atau bulan puasa
- 5) Tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung.
- 6) Tempat bermusyawarah dalam segala urusan
- 7) Letak meunasah harus berbeda dengan letak rumah, supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah atau meunasah dan mengetahui arah kiblat sholat. (M. Ibrahim, 1991: 76)

Selanjutnya sistem pendidikan di Dayah (Pesantren) seperti di Meunasah tetapi materi yang diajarkan adalah kitab Nahu, yang diartikan kitab yang dalam Bahasa Arab, meskipun arti Nahu sendiri adalah tata bahasa (Arab). Dayah biasanya dekat masjid, meskipun ada juga di dekat Teungku yang memiliki dayah itu sendiri, terutama dayah yang tingkat pelajarannya sudah tinggi. Oleh karena itu orang yang ingin belajar nahu itu tidak dapat belajar sambil, untuk itu mereka harus memilih dayah yang agak jauh sedikit dari kampungnya dan tinggal di dayah tersebut yang disebut Meudagang. Di dayah telah disediakan pondok-pondok kecil mamuat dua orang tiap rumah.

Dalam buku karangan Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, istilah Rangkang merupakan madrasah seringkat Tsanawiyah, materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan akhlak. Rangkang juga diselenggarakan disetiap mukim. (Hasbullah, 2001: 32)

Bidang pendidikan di kerajaan Aceh Darussalam benar-benar menjadi perhatian. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yaitu:

- 1) Balai Seutia Hukama, merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 2) Balai Seutia Ulama, merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.
- 3) Balai Jama'ah Himpunan Ulama, merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya.

Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan luar negeri. Sehingga banyak orang luar datang ke Aceh untuk menuntut ilmu, bahkan ibukota Aceh Darussalam berkembang menjadi kota Internasional dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Kerajaan Aceh telah menjalin suatu hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka di Timur Tengah yaitu kerajaan Turki. Pada masa itu banyak pula ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh. Para ulama dan pujangga ini mengajarkan ilmu agama Islam (Theologi Islam) dan berbagai ilmu pengetahuan serta menulis bermacam-macam kitab

berisi ajaran agama. Karenanya pengajaran agama Islam di Aceh menjadi penting dan Aceh menjadi kerajaan Islam yang kuat di nusantara. Diantara para ulama dan pujangga yang pernah datang ke kerajaan Aceh antara lain Muhammad Azhari yang mengajar ilmu Metafisika, Syekh Abdul Khair Ibn Syekh Hajar ahli dalam bidang pognatic dan mistik, Muhammad Yamani ahli dalam bidang ilmu usul fiqh dan Syekh Muhammad Jailani Ibn Hasan yang mengajar logika. (M.Ibrahim,et.al., 1991: 88)

Tokoh pendidikan agama Islam lainnya yang berada di kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang beraliran wujudiyah. Diantara karya-karya Hamzah Fansuri adalah *Asrar Al-Aufin*, *Syarab Al-Asyikin*, dan *Zuiat Al-Nuwahidin*. Sebagai seorang pujangga ia menghasilkan karya-karya, Syair si burung pungguk, syair perahu.

Ulama penting lainnya adalah Syamsuddin As-Samathrani atau lebih dikenal dengan Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri yang mengembangkan paham wujudiyah di Aceh. Kitab yang ditulis, *Mir'atul al-Qulub*, *Miratul Mukmin* dan lainnya.

Ulama dan pujangga lain yang pernah datang ke kerajaan Aceh ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ia menentang paham wujudiyah dan menulis banyak kitab mengenai agama Islam dalam bahasa Arab maupun Melayu klasik. Kitab yang terbesar dan tertinggi mutu dalam kesustraan Melayu klasik dan berisi tentang sejarah kerajaan Aceh adalah kitab *Bustanul Salatin*.

Pada masa kejayaan kerajaan Aceh, masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) oleh Sultannya banyak didirikan masjid sebagai tempat beribadah umat Islam, salah satu masjid yang terkenal Masjid Baitul Rahman, yang juga dijadikan sebagai Perguruan Tinggi dan mempunyai 17 daars (fakultas).

Dengan melihat banyak para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh, serta adanya Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Aceh menjadi pusat studi Islam. Karena faktor agama Islam merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh pada periode berikutnya. Menurut B.J. Boland, bahwa seorang Aceh adalah seorang Islam (M.Ibrahim,et.al., 1991: 89)

2. Kerajaan Demak

Salah seorang raja Majapahit bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam, yang bernama Putri Cempa. Hal ini berpengaruh besar dalam dakwah Islam. Dari Putri Cempa lahir seorang putra yang bernama Raden Fatah, yang kemudian menjadi Raja Islam pertama di Jawa (Demak).

Ada beberapa pendapat tentang berdirinya kerajaan Demak. Sebagian ahli sejarah berpendapat Kerajaan Demak berdiri tahun 1478 M, berdasarkan atas jatuhnya Kerajaan Majapahit. Pendapat lain mengatakan Kerajaan Demak berdiri 1518 M, alasannya bahwa pada tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya masa pemerintahan Prabu Udara Brawijaya VII yang mendapat serbuan Raden Fatah dari Demak.

Namun demikian, kehadiran Kerajaan Demak bukan penyebab runtuhnya Majapahit, tapi lebih disebabkan kelemahan dan kehancuran Majapahit dari dalam sendiri, setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Didahului oleh kelemahan pemerintah pusat yang disusul oleh perang saudara. Seperti perang antara Bre Wirabumi dengan putri mahkota Kusumawardani yang memakan waktu kurang lebih 30 tahun.

Kerajaan Islam Demak dipandang rakyat sebagai cahaya baru yang membawa harapan sebagai kekuatan baru yang akan menghalangi segala bentuk penderitaan lahir batin dan mendatangkan kesejahteraan. Raja Majapahit sudah sudah kenal Islam jauh sebelum kerajaan Demak berdiri, bahkan keluarga Brawijaya yang mengenal Islam melalui Putri Cempa.

Demak baru dinyatakan berdiri sekitar tahun 1518 M. tahun ini terjadi pertempuran antara penerus kekuasaan Majapahit Patih Udara dengan Adipati Yunus yang berkuasa di Demak. Setelah pertempuran tersebut, kekuasaan Majapahit berakhir.

Dengan berdirinya kerajaan Islam Demak yang merupakan Kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam makin meluas, pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju.

a) Pelaksanaan Pendidikan Islam di Kerajaan Demak

Ada kemiripan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak dengan di Aceh, yaitu mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah, di sana diajarkan pendidikan agama di bawah

pimpinan seorang Badal untuk menjadi seorang guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam.

Wali suatu daerah diberi gelaran resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerahnya, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Geseng, Kiai Ageng Tarub, Kiai Ageng Sela, dan lain-lain (Mahmud Yunus, 1985:219).

Antara Kerajaan Demak dengan Walisongo terjalin hubungan khusus, peran para walisongo sangat besar di bidang dakwah Islam, sedang Raden Fatah sendiri menjadi raja atas keputusan para wali dan dalam hal ini para wali tersebut juga sebagai penasehat dan pembantu raja.

Dengan kondisi tersebut, maka yang menjadi sasaran pendidikan dan dakwah Islam adalah kalangan pemerintah dan rakyat umum. Adanya kebijaksanaan para wali menyiarkan agama dan memasukkan pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia, membuat Islam tersebar di seluruh kepulauan-kepulauan Indonesia.

3. Kerajaan Islam Mataram (1575-1757)

Kerajaan Demak tidak bertahan lama, pada tahun 1568 M terjadi perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Perpindahan ini tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang berarti terhadap sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang sudah berjalan.

Pusat kerajaan Islam pindah dari Pajang ke Mataram 1586, kekuasaan dipegang Sultan Agung (1613), terjadi beberapa perubahan. Sultan Agung mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram. Atas usaha Sultan Agung, kebudayaan lama yang berdasarkan Indonesia asli dan Hindu dapat diadaptasikan dengan agama dan kebudayaan Islam.

Pada jaman Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian, sudah tertanam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat saat itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah sudah mulai belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orangtuanya sendiri. Di setiap desa diadakan tempat pengajian alquran, diajarkan huruf hijaiyah, membaca alquran, pokok dan dasar-dasar ilmu agama Islam dan sebagainya. Cara mengajarkan adalah dengan cara hafalan. Di setiap tempat pengajian dipimpin oleh guru yang bergelar modin.

Selain pelajaran alquran, ada pula tempat pengajian kitab bagi murid-murid yang telah khatam mengaji alquran. Tempat pengajiannya disebut pesantren. Para santri tinggal di asrama yang dinamai pondok, di dekat pesantren tersebut. Cara mengajarkan kitab dengan sistem sorogan, seorang demi seorang bagi murid permulaan, dan dengan cara bandongan (halaqah) bagi pelajar yang sudah lama dan mendalam keilmuannya.

Pada beberapa daerah kabupaten diadakan pesantren besar, dilengkapi pondok, untuk kelanjutan bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren-pesantren desa. Pesantren ini sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi.

Kitab yang diajarkan di pesantren besar adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Berbagai ilmu agama diajarkan, seperti fiqh, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Selain pesantren besar, juga diselenggarakan pesantren takhasus, yang mengajarkan satu cabang ilmu agama dengan cara mendalam atau spesialisasi.

4. Kerajaan Islam di Banjarmasin (1526 M)

Kerajaan Demak berperan penting dalam memasukkan Islam ke Kalimantan, dan berkembang setelah Kerajaan Islam Banjarmasin di bawah pimpinan Sultan Suriansyah.

Sistem pengajian kitab di pesantren Banjarmasin tidak berbeda dengan sistem pengajian kitab di pondok pesantren Jawa ataupun Sumatra, yaitu dengan sistem halaqah, menerjemahkan kitab ke dalam bahasa daerah, dan para santri menyimaknya.

Tokoh yang terkenal adalah Syekh Muhammad Arsyad (pendiri pondok pesantren Darussalam) dan Syekh Nafis Al Banjary, yang banyak mengarang kitab. Ketika pemerintah colonial Belanda berusaha menguasai daerah Banjar, meletus perang Banjar 28 April 1859 dipimpin seorang ulama besar Pangeran Antasari. Perang berlangsung lebih dari 40 tahun dan baru mereda setelah wafatnya Pangeran Antasari.

BAB III

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

A. KEDATANGAN BANGSA EROPA

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mulanya didasarkan pada sistem kedaerahan dan tidak terkoordinir dan terpusat seperti saat ini, sebab tiap daerah berusaha melancarkan pendidikan dan pengajaran Islam menurut daerahnya masing-masing. Kondisi demikian ternyata tidak menghalangi tersebar luasnya Islam yang dipeluk mayoritas penduduk nusantara. Islam bahkan pernah menjadi agama resmi pada masa Kerajaan Pasai di Aceh abad ke-13 dan Kerajaan Demak di Jawa Tengah akhir abad ke-15 M.

Penyebaran agama Islam berlangsung damai tanpa paksaan di daerah pantai. Untuk daerah pedalaman proses islamisasi berjalan lebih lamban dan memerlukan waktu lebih lama. Orang-orang pedalaman masih memegang agama dan adatnya yang lama. Meski demikian prinsip hidup damai, bertetangga antara orang pantai yang sudah Islam dan orang pedalaman yang masih kuat memegang agama Hindu atau Budha masih tetap dipertahankan masyarakat saat itu.

Kondisi yang demikian menjadi berubah setelah datangnya imperialis Eropa Barat yang selain berdagang membawa pula misi menguasai daerah yang didatangi, serta penyebaran agama. Kedatangan bangsa Eropa ini menimbulkan reaksi dan pertentangan dimana-mana di kepulauan Nusantara, karena mereka di samping merugikan penduduk pribumi, juga merusak tatanan sosial budaya masyarakat yang sudah ada.

Usaha penaklukan oleh bangsa Eropa dimulai dengan jalan perdagangan, dilanjutkan dengan menggunakan kekuatan militer. Saat itu dunia Timur dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang merupakan komoditi sangat langka dan mahal harganya untuk bangsa Eropa.

Reaksi perlawanan datang dari berbagai daerah di nusantara, seperti serangan Adipati Unus terhadap Portugis di Malaka, Sultan Agung, Trunojoyo, Diponegoro, Perang Paderi, Perang Aceh, dan sebagainya. Perlawanan tersebut sebagian besar dipimpin oleh para tokoh Islam.

1. Organisasi dan Pendidikan Islam

Di setiap daerah yang penduduknya Islam berdiri masjid yang berfungsi di samping sebagai tempat ibadah juga pusat kegiatan Islam. Setiap tokoh agama Islam (kiai/wali)

pada masa itu selalu mementingkan dan mendahulukan pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendidikan agama non formal semakin luas dan terarah.

Pendidikan agama yang diberikan saat itu bertujuan:

- a. Mengajak manusia berbuat baik, patuh mengerjakan agama secara bersungguh-sungguh;
- b. Menjaga tradisi, sesuatu yang dianggap penting dan diperlukan oleh keluarga dan masyarakat harus diturunkan dan diajarkan kepada anak cucu secara turun temurun sebagai regenerasi.

2. Metode Pendidikan

a. Ceramah atau nasihat langsung

Dilakukan di tempat-tempat berkumpul kaum muslimin seperti di masjid atau langgar. Nasihat secara langsung diberikan terutama yang berkenaan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya;

b. Teladan yang baik

Dengan penampilan pribadi yang menonjolkan tingkah laku baik dan terpuji yang bisa ditiru dan diteladani para murid. Factor keteladanan ini sangat berperan dalam dakwah Islam sejak awal

c. Media kesenian dan permainan

Seni menjadi metode dakwah paling efektif saat itu. Seperti dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan wayangnya. Banyak orang mulai tertarik masuk Islam, meskipun secara kualitas masih memerlukan pembinaan lebih jauh. Juga Gamelan Sekaten di Yogyakarta dan Solo dalam perayaan hari lahir Rasulullah SAW. Istilah sekaten diambil dari bahasa Arab Syahadataini yang artinya dua kalimat syahadat.

B. ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Kedatangan bangsa Barat di satu pihak telah mendatangkan kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi tersebut bukan dinikmati penduduk pribumi, tujuannya hanya untuk meningkatkan hasil penjahannya. Begitu pula dalam pendidikan, mereka telah memperkenalkan sistem dan metode baru, namun semua itu dilakukan semata-mata untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat.

Berbeda dengan Inggris, sebagai penjajah tapi tidak mengesampingkan kemajuan pribumi terutama di bidang pendidikannya, Belanda menjadi negara penjajah yang hanya

mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan memeras tenaga, sumber alam dan sebagainya sekaligus diadakan semacam pembodohan terhadap penduduk pribumi.

Setelah mengalahkan perlawanan dari para tokoh politik dan agama, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Cik Di Tiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin, dan lain-lain, maka Belanda secara politik sudah menguasai Indonesia. Raja-raja di daerah-daerah tertentu memang masih ada, namun kekuasaannya sangat terbatas, baik di segi kewilayahannya maupun ketatanegaraannya. Dengan begitu maka hampir semua kekuasaan politik maupun ekonomi, sosial-budaya berada di tangan penjajah. Belanda berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama yang mereka sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang sebagai kaum imperialis dan kolonialisme, yaitu westernisasi dan kristenisasi.

Inisiatif mendirikan lembaga pendidikan bagi penduduk pribumi baru ada ketika Van Den Capellen menjabat sebagai Gubernur Jenderal, di mana waktu itu dia memberikan surat edaran bagi para Bupati, yang isinya: “Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara yang diterapkan Belanda”. Lembaga pendidikan didirikan hanya semata demi kepentingan mereka. Pendidikan agama Islam yang telah ada di pesantren, mesjid, dan mushalla dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf latin, yang secara resmi menjadi acuan pada waktu itu. Bahkan untuk membatasi gerak pendidikan Islam, dikeluarkan beberapa aturan seperti:

1. Tahun 1882, dibentuk badan khusus yang mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Priesterraden. Dari nasihat badan ini, tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan aturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikana pengajaran atau pengajian agama Islam harus meminta ijin pada pemerintah Belanda;
2. Tahun 1925 keluar aturan yang lebih ketat terhadap pendidikan pendidikan agama Islam, tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji kecuali telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari pemerintah;
3. Tahun 1932 keluar lagi aturan berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada ijinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda, atau disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilden School Ordonantie*).

Tidak hanya itu, segala hal tentang pribumi dan Islam di Indonesia mereka pelajari dengan sebaik-baiknya di negeri Belanda, yang akhirnya menjadi ilmu khusus yang dikenal dengan indologi (Aqib Suminto, 1985:2). Hal ini dilakukan untuk menekan dan mematikan kegiatan-kegiatan orang Islam.

Untuk menghadapi perlawanan umat Islam yang dipelopori oleh raja dan ulama, keadaan umat Islam di Indonesia dipelajari secara khusus oleh Prof. Snouck Hurgronje dengan nama samarannya Abdul Gaffar, seorang sarjana sastra semit (Arab) yang telah lama belajar dan berpengalaman di tanah Arab, serta berperan besar dalam penyelesaian perang Aceh yang berlarut-larut. Ia mempelajari Islam di Indonesia dan mencari celah-celah kelemahannya untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya pada pemerintah Belanda disertai saran-saran terbaik dalam menghadapi orang Islam di Indonesia. Saran tersebut menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam di Indonesia. Inti dari saran-saran tersebut:

1. Agar pemerintah Belanda netral terhadap agama dan tidak campur tangan dan tidak memihak kepada salah satu agama yang ada. Menurut Snouck, fanatisme Islam akan luntur sedikit demi sedikit melalui proses pendidikan secara evolusi;
2. Pemerintah Belanda diharapkan dapat membendung masuknya pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur dari luar ke wilayah Indonesia. Mengawasi kontak langsung dan tidak langsung tokoh-tokoh Islam dengan tokoh luar, serta membatasi dan mengawasi orang-orang yang pergi ke Mekah, bahkan kalau mungkin melarangnya sama sekali.

Dalam prakteknya, politik Islam dan politik pendidikan yang dijalankan pemerintah colonial yang menomorsatukan anak-anak pejabat dan pembesar justru membatasi pendidikan pribumi dan menggiring putra pribumi tersebut pergi ke pondok-pondok pesantren. Proses ini justru mendasari kuatnya kepercayaan beragama penduduk pribumi yang beragama Islam. Banyak pula tokoh-tokoh Islam yang mendapatkan brosur dan majalah terlarang dari Timur Tengah, serta jumlah jemaah haji Indonesia pun tetap melimpah.

Seperti dikemukakan Wertheim, bahwa apa pun politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non Islam, hasilnya akan berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaan tersebut (Ridwan saidi, 1984:3). Tekanan demi tekanan sama sekali tidak menggoyahkan mereka. Kondisi pendidikan Islam itu sendiri tumbuh dan berkembang, meskipun berbagai kebijaksanaan telah diterapkan.

1. Pendidikan Islam Sebelum Tahun 1900

Pendidikan Islam sebelum tahun 1900 lebih pada pendidikan secara perorangan, secara rumah tangga, dan secara surau/langgar atau masjid. Pendidikan tersebut mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang ketuhanan, keimanan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Pemisahan mata pelajaran tertentu belum ada dan pelajaran yang diberikan pun belum secara sistematis (Sidi Ibrahim Boechari, 1981:62).

Pendidikan surau mempunyai dua tingkatan yaitu: pelajaran alquran dan pengkajian kitab. Pada pelajaran alquran diberikan pelajaran huruf hijaiyah, Juz'amma dan alquran. Setelah menyelesaikan pelajaran alquran, dilanjutkan pengkajian kitab. Pada pengkajian ini diajarkan ilmu sharf, tafsir, dan ilmu-ilmu lain.

Pendidikan Islam pada masa itu mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Pelajaran diberikan satu demi satu
- b. Pelajaran ilmu sharf didahulukan dari ilmu nahu
- c. Buku pelajaran dikarang oleh ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat
- d. Kitab yang diajarkan umumnya ditulis tangan
- e. Pelajaran suatu ilmu diajarkan dalam satu macam buku saja
- f. Took buku belum ada, dilakukan dengan menyalin buku dengan tulisan tangan
- g. Karena terbatasnya bacaan, materi ilmu agama sangat sedikit
- h. Belum lahir aliran baru dalam Islam

Pada periode ini sulit untuk menentukan secara pasti kapan surau atau langgar dan pesantren yang pertama berdiri. Namun demikian, pada abad ke-17 M di Jawa telah terdapat pesantren Sunan Bonang di Tuban, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Sidomukti Giri dan sebagainya (Timur Djaelani, 1980:17). Namun sebenarnya jauh sebelum itu telah ada sebuah pesantren di hutan Glagah Arum (Selatan Jepara) yang didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1475 M (Mahmud Yunus, 1984:217). Sementara itu di Sumatera tempat pengajian berupa surau jauh sebelum itu sudah dikenal, namun sulit untuk mengetahui secara pasti tahun berapa dan di mana.

2. Pendidikan Islam Pada Masa Peralihan (1900-1908)

Dalam periode ini telah banyak berdiri tempat pendidikan Islam terkenal di Sumatera, seperti surau Parabek Bukit Tinggi (1908) yang didirikan oleh Syekh Ibrahim Parabek dan di Pulau Jawa seperti Pesantren Tebu Ireng, namun sistem madrasah belum dikenal.

Periode ini dipelopori oleh Syekh Khatib Minangkabau dan kawan-kawannya yang banyak mendidik dan mengajar pemuda di Mekkah, terutama pemuda-pemuda yang berasal dari Indonesia dan Malaya. Murid-muridnya seperti H. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) yang mengajar di Surau Jembatan Besi Padang Panjang, K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, K.H. Hasyim Asy'ari pendiri pesantren Tebu Ireng dan NU, dan K.H. Adnan di Solo (Sidi Ibrahim Boechari, 1981:79). Mereka ini ketika kembali dari Mekkah ikut andil dalam pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia sekembalinya ke tanah air.

Pembaharuan Islam di Indonesia diilhami pula oleh pengaruh yang datang dari Mesir. Syekh Thaher Jalaluddin dianggap sebagai pembaharu di Indonesia karena banyak memperkenalkan paham Muhammad Abduh melalui majalah al-Imam yang diterbitkan di Singapura sekitar tahun 1906. Majalah ini memuat artikel tentang pengetahuan populer, komentar tentang kejadian-kejadian penting di dunia, terutama di dunia Islam juga mengenai maslaah-masalah agama. Majalah al-Imam tersebar di kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Majalah ini mengilhami H. Abdullah Ahmad untuk menerbitkan Majalah al-Munir di Padang tahun 1911 (Deliar Noer, 1980:41).

Pelajaran Islam pada masa peralihan berciri:

- a. Pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus;
 - b. Pelajaran ilmu Nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sharf
 - c. Semua buku pelajaran karangan ulama Islam kuno dan dalam bahasa Arab
 - d. Buku-buku semua dicetak
 - e. Suatu ilmu diajarkan dari bermacam-macam buku, rendah, menengah dan tinggi
 - f. Telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekkah
 - g. Ilmu agama telah berkembang luas
 - h. Aliran baru dalam Islam seperti dibawa oleh Majalah al-Manar di Mesir mulai lahir
- Pendidikan Islam masa ini sudah mengalami kemajuan, meski saat itu kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam sangat ketat. Di samping itu pemerintah colonial juga sedang gencar mempropagandakan pendidikan yang mereka kelola, yaitu pendidikan yang membedakan antara golongan pribumi dengan golongan priyayi atau pejabat bahkan yang beragama Kristen.

3. Pendidikan Islam Sesudah Tahun 1909

Sejak 1908 muncul kesadaran baru tentang nasionalisme yang menyadarkan bangsa Indonesia, bahwa perjuangan kedaerahan sulit untuk mencapai keberhasilan. Karena

itu sejak tahun 1908 timbul kesadaran baru dari bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan. Kesadaran demikian juga muncul di kalangan pendidik Islam. Para ulama saat itu menyadari bahwa sistem pendidikan langgar dan pesantren tradisional merka sudah tidak begitu sesuai lagi dengan iklim Indonesia dan jumlah murid yang ingin belajar semakin bertambah, maka dirasakan kebutuhan untuk memberkikan pelajaran agama di madrasah atau sekolah secara teratur. Maka berdirilah seperti madrasah Adabiyah pada tahun 1909 di Padang oleh Syekh Abdullah Ahmad, madrasah diniyah di Padang Panjang oleh Zainuddin Labai El Yunusi tahun 1915 (Mahmud Yunus, 1985:63).

Surau pertama yang memakai sistem kelas dalam belajar mengajar adalah Sumatera Thawalib Padang Panjang yang dipimpin Syekh Abdul Karim Amrullah tahun 1921. Pada tahun yang sama diikuti Sumatera Thawalib Parabek Bukit Tinggi yang dipimpin Syekh Ibrahim Musa (Mahmud Yunus, 1985:73). Sedang madrasah pertama di Aceh adalah Madrasah Sa'adah Adabiyah yang didirikan oleh Jam'iyyah Diniyah Pimpinan T. Daud Beureuh tahun 1930 di Belang Paseh Sigli (Mahmud Yunus, 1985:177). Kemudian di Jawa pada tahun 1919 K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang (Timur Djaelani, 1980:19).

Dapat disimpulkan bahwa madrasah dikenal pada awal abad ke-20. Sistem ini membawa pembaharuan antara lain:

- a. Sistem pengajaran, dari perorangan/sorogan menjadi klasikal
 - b. Pengajaran pengetahuan umum di samping pengetahuan agama dan bahasa Arab
- Pendidikan madrasah mulai dikenal dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia, banyak didirikan baik dengan usaha pribadi atau oleh organisasi-organisasi Islam, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Meskipun pemerintah kolonial berusaha menghalangi perkembangannya, karena kekhawatiran pendidikan tersebut dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, juga berfungsi mengembangkan ajaran-ajaran Islam di kalangan remaja sehingga membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya kekhawatiran mereka memang menjadi kenyataan.

C. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya, hal ini direncanakan Jepang sejak 1940 untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang ingin menjadi pusat suatu lingkungan yang berpengaruh atas daerah-daerah Mansyuria, Daratan Cina, Kepulauan Filipina,

Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo Cina, dan Rusia. Masa kejayaan penjajah Belanda hilang ketika pada tanggal 8 Maret 1942 mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

1. Tujuan Persekolahan Secara Umum

Pendidikan masa ini disebut Hakko Ichiu, yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Setiap hari pelajar terutama pada pagi hari harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan pada jaman Jepang banyak perbedaan dibandingkan dengan jaman penjajahan Belanda.

Sekolah-sekolah yang ada pada jaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Segala upaya ditujukan untuk kepentingan perang. Murid-murid hanya mendapat pengetahuan yang sedikit sekali, karena sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja.

Kegiatan-kegiatan sekolah antara lain:

- a. Mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang
- b. Membersihkan bengkel-bengkel, asrama-asrama militer
- c. Menanam ubi, sayur, di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan
- d. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas

Tujuan pendidikan pada jaman Jepang tidak banyak ditemukan, karena tujuan utama hanya memenangkan perang. Secara konkret tujuan yang ingin dicapai untuk menyediakan tenaga Cuma-Cuma (romusha) dan prajurit-prajurit untuk membantu perang bagi kepentingan Jepang. Oleh karenanya pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Ada tujuan pula untuk menjepangkan anak-anak Indonesia, dikerahkan barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama "Sendenbu", bertugas menanamkan ideology baru untuk menghancurkan ideology Indonesia Raya (I Djumhur, 1979:195).

Untuk menyebarkan ideology dan semangat Jepang, para guru diupgrade secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang selama 3 bulan di Jakarta. Mereka wajib meneruskan materi yang diterima kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang, kepada murid-murid diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran.

Namun demikian, pada jaman ini terjadi perubahan cukup mendasar di bidang pendidikan yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia (I. Djumhur, 1976:196):

- a. Hapusnya dualisme pengajaran

Berbagai macam sekolah rendah yang diselenggarakan pada jaman Belanda dihapuskan sama sekali, maka hapus pula dua jenis pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra. Hanya ada satu jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: sekolah Rakyat 6 tahun, yang populer dengan nama “Kokumin Gakko”. Sekolah-sekolah desa tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. Jenjang pengajaran menjadi:

- 1) Sekolah rakyat 6 tahun (termasuk sekolah pertama)
- 2) Sekolah menengah 3 tahun
- 3) Sekolah menengah tinggi 3 tahun (SMA-nya pada jaman Jepang).

b. Pemakaian bahasa Indonesia

Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa pengantar pada tiap jenis sekolah.

2. Sikap Jepang Terhadap Pendidikan Islam

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas daripada jaman pemerintah Belanda. Karena Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, bagi mereka yang penting adalah demi keperluan memenangkan perang, jika perlu para pemuka agama lebih diberi keleluasaan dalam mengembangkan pendidikannya.

Membela kepentingan Islam memang menjadi salah satu siasat pemerintah Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II. Beberapa kebijaksanaan dalam mendekati umat Islam seperti:

- a. Kantor Urusan Agama, yang pada jaman Belanda disebut Kantoer Voor Islamistische Zaken, yang dipimpin orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang, dan di daerah-daerah juga dibentuk Sumubi;
- b. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang;
- c. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama;
- d. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam, dipimpin K.H. Zainal Arifin;
- e. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.

- f. Para ulama Islam dan para pemimpin nasionalis diijinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (peta). Tokoh-tokoh santri ikut dalam latihan kader militer tersebut, antara lain: Sudirman, Abd. Khaliq Hasyim, Iskandar Sulaiman dan lain-lain. Tentara peta inilah yang menjadi inti dari TNI sekarang.
- g. Umat Islam diijinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Jepang memandang Islam sebagai salah satu sarana penting untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia dan menanamkan cita-cita mereka ke bagian masyarakat yang paling bawah.

Secara umum terjadi kemunduran dan kemerosotan yang luar biasa dalam bidang pendidikan karena ketatnya pengaruh indoktrinasi serta disiplin mati akibat pendidikan militerisme fascisme Jepang. Namun demikian masih ada keuntungan-keuntungan khususnya di bidang pendidikan, seperti (Ary H. Gunawan, 1986:29-30):

- a. Bahasa Indonesia hidup dan berkembang secara luas diseluruh Indonesia, baik sebagai bahasa pergaulan, pengantar, maupun sebagai bahasa ilmiah;
- b. Buku-buku dalam bahasa asing yang diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan mengabaikan hak cipta internasional, karena dalam suasana perang. Bahasa asing yang dibenarkan dipergunakan di Indonesia hanyalah bahasa Jepang;
- c. Kreativitas guru-guru berkembang dalam memenuhi kekurangan buku pelajaran dengan menyadur atau mengarang sendiri, termasuk kreativitas menciptakan alat peraga dan model dengan bahan dan alat yang tersedia;
- d. Seni bela diri dan latihan perang sebagai kegiatan kurikuler di sekolah telah membangkitkan keberanian pada para pemuda yang ternyata sangat berguna dalam perang kemerdekaan yang terjadi kemudian. Termasuk juga Seinendan, Keibodan, Heiho, dan Peta yang telah terlatih mempergunakan senjata api;
- e. Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama ditiadakan, sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan;
- f. Sekolah-sekolah diseragamkan, dan sekolah-sekolah swasta dinegerikan serta berkembang di bawah pengaturan Kantor Pengajaran "Bunkyo Kyoku";
- g. Munculnya perasaan rindu kepada kebudayaan sendiri dan kemerdekaan nasional yang berkembang dan bergejolak akibat pengaruh indoktrinasi yang ketat untuk menjepanagkan rakyat Indonesia;

- h. Bangsa Indonesia dididik dan dilatih untuk memegang jabatan walaupun di bawah pengawasan orang-orang Jepang.
3. **Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah**
- Karena mendapatkan kesempatan, maka pada awal masa pendudukan Jepang madrasah dibangun dengan gencar. Kesempatan yang ada tidak disia-siakan oleh umat Islam. Hal ini dapat dilihat di Sumatera yang terkenal dengan madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi.
- Hampir di setiap pelosok pedesaan terdapat madrasah Awaliyah yang dikunjungi banyak anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah tersebut diadakan pada sore hari ± setengah jam lamanya, materi yang diajarkan adalah membaca alquran, ibadah, akhlak, dan keimanan sebagai latihan pelajaran agama di sekolah.
- Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan sebagainya. Madrasah cukup beruntung berada di lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan di dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar.

D. ZAMAN KEMERDEKAAN

Setelah merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha ini dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut seperti dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Madrasah dan pesantren yang ada pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah (Timur Djaelani, 1980: 135).”

Kenyataan demikian timbul karena kesadaran umat Islam yang sekian lama terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah tetap membina pendidikan agama, yang secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karenanya dikeluarkan peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Khusus untuk mengelola pendidikan agama untuk sekolah umum, bulan Desember 1946 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri PP dan K dengan menteri agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum (negeri/swasta) yang berada di bawah kementerian PP dan K. Sejak itulah terjadi dualism pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan Agama dan Pendidikan Umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun sekolah umum, di lain pihak Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan mengelola pendidikan pada umumnya dan mendapat kepercayaan melaksanakan sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU No. 4 Tahun 1950 pada bab XII pasal 20, yaitu:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut;
2. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan, bersama-sama dengan menteri agama.

Pada akhir Orde Lama tahun 1965, lahir kesadaran baru umat Islam untuk memperbaiki pendidikan agama untuk memperkuat umat Islam. Kementrian agama mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:

1. Pesantren Indonesia Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama. Baik guru maupun murid merupakan suatu masyarakat yang hidup dan bekerjasama, mengerjakan tanah milik pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri;
2. Madrasah Diniyah, sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7-20 tahun. Pelajaran berlangsung di dalam kelas, kira-kira 10 jam per minggu, di waktu sore, di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (4 tahun pada SD dan 3-6 tahun pada Sekolah Menengah). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah negeri, murid-murid ini akan dapat diterima pada pendidikan agama tingkat akademi;
3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran umum. Tujuannya adalah menyediakan 60%-65% dari jadwal dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum, dan 35-40% untuk mata pelajaran agama;

4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu SD negeri 6 tahun. Pendidikan selanjutnya pada MTsN;
5. Pendidikan teologi tertinggi pada tingkat universitas diberikan sejak 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian atau dua Fakultas di Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta.

BAB IV

PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PENGARUH BARAT

A. PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PORTUGIS

Akibat perkembangan perdagangan, maka pada awal abad ke-16 datanglah bangsa Eropa pertama ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, tujuan kedatangan mereka ke Indonesia adalah mengembangkan agama Katolik. Pengaruh kebudayaan mereka paling banyak di daerah Maluku.

Kedatangan bangsa Portugis dibarengi oleh missionaries yang bertugas menyebarkan agama Katolik di kalangan penduduk pribumi. Seorang di antaranya adalah Franciscus Xaverius, yang dianggap sebagai peletak batu pertama dari agama Katolik di Indonesia. Ia berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik itu, perlu didirikan sekolah-sekolah.

Pada tahun 1536 didirikan di Ternate sebuah seminari, yang merupakan sekolah agama bagi anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Selain di Ternate juga di Solor didirikan pula seminari dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid. Di sekolah tersebut diajarkan pula bahasa Latin.

Pendidikan yang lebih tinggi diberikan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda Indonesia yang cakap dikirimkan ke sana untuk mendapat pendidikan. selanjutnya mereka akan menjadi pembantu-pembantu paderi.

Pada tahun 1546, di Ambon sudah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Katolik. Di sana diselenggarakan pula pengajaran untuk rakyat yang bersifat umum. Namun demikian keterangan-keterangan tentang hal ini tidak diketahui secara pasti.

Banyak pemberontakan-pemberontakan yang muncul, terutama dari Sultan Ternate, dan banyaknya peperangan yang harus dihadapi dari orang-orang Spanyol, Inggris dan Belanda, maka pada akhir abad ke-16 habislah kekuasaan Portugis di Indonesia. Berarti habis pula riwayat misi Katolik di daerah Maluku. Misi ini pada dasarnya adalah misi negara, artinya para missionaries mendapat jaminan hidup dari negara. Akhirnya usaha-usaha pendidikan pun terpaksa dihentikan.

B. PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA VOC

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh VOC terutama dipusatkan di bagian Timur Indonesia, di mana agama Katolik telah berakhir dan di Batavia (Jakarta), pusat administrasi kolonial. Pada tahun 1607 didirikan sekolah pertama di Ambon untuk anak-anak Indonesia, karena pada saat itu belum ada anak Belanda. Tujuan utama untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan, *calvinisme*. Jumlah sekolah cepat bertambah. Pada tahun 1632 telah ada 16 sekolah di Ambon, di tahun 1645 meningkat menjadi 33 buah dengan 1300 murid. Akan tetapi pada abad ke-18 perkembangannya menurun. Pada saat itu agama Katolik sudah dilenyapkan dan tidak diperlukan tenaga kerja untuk pemerintahan di sana, sedangkan pendidikan demi perkembangan kecerdasan penduduk masih merupakan gagasan yang belum lahir.

Sekolah pertama di Jakarta dibuka tahun 1630 untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC. Pada tahun 1636 jumlahnya menjadi 3 buah dan pada tahun 1706 telah ada 34 guru dan 4873 murid. Sekolah-sekolah itu terbuka bagi semua anak tanpa perbedaan kebangsaan.

Kurikulum pada masa ini, sekolah-sekolah selama VOC bertalian erat dengan gereja. Menurut instruksi Heeren XVII, badan tertinggi VOC di Belanda terdiri atas 17 orang anggota, tahun 1617, gubernur di Indonesia harus menyebarluaskan agama Kristen dan mendirikan sekolah untuk tugas itu. Menurut peraturan sekolah 1643 tugas guru ialah: memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen, mengajar anak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa, dan guru-guru.

Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan, biasanya sekolah menyajikan pelajaran tentang katekismus, agama, juga membaca, menulis, dan bernyanyi. Lama belajar tidak ditentukan. Peraturan hanya menentukan bahwa anak laki-laki lebih-lebih dari usia 16 tahun dan anak perempuan lebih dari 12 tahun hendaknya jangan dikeluarkan dari sekolah. Usia itu kemudian diturunkan menjadi 12 tahun untuk anak-anak laki-laki dan 10 tahun untuk anak perempuan. Pembagian dalam 3 kelas untuk pertama kali dilakukan tahun 1778. Di kelas 3, kelas terendah, anak-anak belajar abjad, di kelas 2 membaca, menulis dan bernyanyi dan di kelas 1, kelas tertinggi: membaca menulis, katekismus, bernyanyi, dan berhitung.

Saat itu belum ada pengajaran klasikal. Mengajar tetap berdasarkan pengajaran individual. Murid-murid datang seorang demi seorang ke meja guru dan menerima

individual. Menyanyi lagu gerejani dan resitasi teks buku injil dilakukan bersama oleh seluruh kelas. Kenaikan kelas tahunan tidak ada.

Semua sekolah di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pendeta. Guru-guru diangkat oleh gereja Reformasi di Amsterdam. Sebelum dikirim ke tanah jajahan mereka mula-mula diuji tentang kemampuannya membaca dan menyanyikan lagu-lagu gereja. Kebanyakan di antara mereka terdapat orang-orang seperti penjajah, tentara, pembuat peti mati, bahkan bekas pastor Katolik dan rabbi Yahudi.

Masalah yang rumit dalam pendidikan adalah bahasa pengantar di sekolah. Guru pertama di Ambon, yang ingin menjadikan tanah jajahan sungguh-sungguh koloni Belanda yang berbahasa Belanda seperti dicita-citakan oleh atasannya, menggunakan bahasa Belanda di sekolah. Rupanya ia gagal dan guru berikutnya menggunakan bahasa Melayu, karena ternyata bahasa Belanda terlalu sulit untuk dikuasai. Orang Belanda gagal mencapai hasil yang sama seperti orang Portugis mengenai bahasa. Sampai akhir abad ke-18 bahasa Portugis masih sama populernya dengan bahasa Melayu, termasuk di Jakarta, pusat kekuasaan Belanda. Khotbah di gereja dilakukan dalam bahasa Melayu dan Portugis. Tahun 1760, orang Belanda maupun Indonesia menerima pelajaran yang sama dalam bahasa Melayu dan Portugis.

Banyak usaha dilakukan untuk mempopulerkan bahasa Belanda. Peraturan sekolah tahun 1643 menentukan bahasa Belanda sebagai bahasa satu-satunya. Pada tahun 1674 Gubernur Jenderal J. Maetsuycker mengeluh tentang peran dominan dari bahasa Portugis bahkan di kalangan orang Belanda sendiri dan menekankan makna politik bahasa Belanda untuk mempertahankan hegemoni di tanah jajahan. Tahun 1780 kembali ditekankan agar hanya bahasa Belanda digunakan di sekolah. Peraturan ini dicabut pada tahun 1786, lalu bahasa Melayu dan Portugis digunakan kembali semata-mata karena alasan bahwa orang tua dan anak tidak memahami bahasa Belanda. Bahasa Belanda banyak kehilangan fungsinya setelah kitab Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1733.

Nilai bahasa Belanda melonjak setelah diadakannya *Klein Ambternaarsexamen* atau ujian pegawai rendah pada tahun 1864 yang menjadi syarat bagi pengangkatan pegawai pemerintah. Yang diuji antara lain bahasa Belanda untuk memperoleh ijazah. Bahasa Belanda menduduki tempat yang dominan setelah merupakan jalan satu-satunya ke pendidikan menengah dan tinggi.

Perkembangan pendidikan mulai merosot pada pertengahan abad ke-18. Jakarta yang berpenduduk 16.000 jiwa hanya mempunyai 270 murid, Surabaya hanya 24 dan di seluruh pulau Jawa hanya 350 murid. Sewaktu seorang pendeta mengunjungi gereja-

gereja di pantai utara Jawa, ia tidak menyinggung sedikitpun tentang pendidikan dalam laporannya.

Pada tahun 1890 tidak lagi diberikan khotbah di Ambon karena ketiadaan guru agama atau pendeta. Banyak gereja digunakan sebagai gudang. Keadaan di Jakarta tidak lebih baik. Sewaktu pada tahun 1800 sejumlah uang disumbangkan kepada sekolah di Jakarta tidak diketahui apa yang harus diperbuat dengan uang itu karena saat itu tidak seorangpun guru Belanda di sana. Pada saat yang sama VOC dibubarkan.

Masa *Interregnum* Inggris (1811-1816) tidak membawa perubahan walaupun Sir Stamford Raffles ahli negara yang cemerlang. Saat tanah jajahan dikembalikan pada Belanda tahun 1816, pendidikan berada dalam keadaan yang menyedihkan dengan tidak adanya satu sekolah pun di luar Jawa. Setelah dua abad di bawah pemerintahan VOC keadaan pendidikan lebih menyedihkan lagi dibandingkan dengan waktu orang Belanda mulai menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

C. PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (Sejak 1816)

1. Pendidikan Bagi Anak Belanda

Sejak 1816 pemerintah Belanda menggantikan kedudukan VOC. Belanda tahun 1801 dengan terang-terangan menyatakan bahwa “tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan dan kepada kekayaan negeri Belanda”.

Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta tahun 1817 yang diikuti pembukaan sekolah di kota-kota lain di Jawa. Sampai dengan tahun 1857 jumlahnya mencapai 57. Sekolah menengah didirikan tahun 1860, membuka kesempatan bagi anak-anak Belanda melanjutkan pelajarannya di universitas di negeri Belanda, atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan. Jalan ke perguruan tinggi telah tersedia bagi anak Belanda pada saat hanya segelintir anak pribumi terdapat pada sekolah rendah yang jumlahnya hanya sedikit dan tidak membuka kesempatan memasuki pendidikan lanjutan. Selama puluhan tahun, jalan satu-satunya untuk melanjutkan pelajaran ialah E.L.S (Europese Lagere School), sekolah rendah khusus untuk anak Belanda. Sekolah ini hanya menerima sejumlah kecil anak-anak Indonesia dari kalangan priayi kaya. Karena adanya pembatasan-pembatasan, pembayaran tinggi, dan kesulitan bahasa.

Kurikulum sekolah mengalami perubahan radikal. Dipengaruhi ide liberalism, orang menaruh kepercayaan akan kekuasaan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah empiris. Tujuan pendidikan bukan lagi untuk memupuk rasa takut akan Tuhan dan pusat studi bukan lagi kitab injil. Pendidikan ditujukan pada pengembangan intelektual, nilai-nilai rasional dan sosial dan usaha mencapai tujuan-tujuan sekuler lainnya.

Kurikulum sekolah rendah meliputi, selain pelajaran tradisional membaca, menulis, dan berhitung, juga pelajaran baru seperti geografi, sejarah, dan pelajaran sekuler lainnya. Moralitas tidak dicapai melalui kitab injil, tetapi melalui peraturan sekolah dan cerita-cerita bertema moral agar murid memahami apa yang baik dan berbuat demikian.

2. Pendidikan Bagi Anak Indonesia

Jumlah anak Indonesia pada sekolah Belanda sangat minimal. Menurut laporan kepala komisi pendidikan tahun 1847 hanya 37 anak-anak bukan Kristen terdapat diantara 1700 murid. Gubernur Jenderal mengemukakan kebijaksanaan sesuai advis Dewan Hindia Belanda agar jangan menerima anak Cina dan Bumiputera tanpa rundingan dengan pemerintah.

Bagi anak Indonesia, Marsekal Daendels (1808) memerintahkan regen-regen di Jawa bagian utara dan timur harus mendirikan sekolah atas biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan sendiri, sehingga tidak merugikan perbendaharaan pemerintah.

Gubernur jenderal Van der Capellen (1819-1923) menganjurkan pendidikan rakyat berdasarkan masyarakat desa dan pada tahun 1820 kembali regen-regen diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis dan mengenal budi pekerti baik. Anjuran ini tidak berhasil mengembangkan pendidikan. Tahun 1849 hanya dua sekolah didirikan oleh regen yang aktif.

Alasan kesulitan keuangan menjadi dasar tidak diselenggarakannya pendidikan bagi bumiputera. Dampak dari Perang Diponegoro (1825-1830) yang mahal dan banyak menelan korban, serta perang antara Belanda dan Belanda (1830-1839). Keadaan ini menyebabkan raja Belanda meninggalkan prinsip-prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan oleh Van den Bosch, di mana pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi kolonial. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa sebagai cara paling

ampuh untuk memperoleh keuntungan maksimal, yang kemudian dikenal sebagai *cultuurstelsel* atau tanam paksa, yang memaksa penduduk Jawa untuk menghasilkan tanaman untuk pasar Eropa.

Tanam paksa tidak hanya membantu Belanda mengatasi kesulitan finansial yang mereka hadapi, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk mengeruk ratusan juta keuntungan bersih dengan praktik-praktik kotor dengan mengorbankan jiwa manusia yang tidak sedikit. Namun demikian, kekejaman ini ternyata dapat menimbulkan hal-hal yang menguntungkan. Sistem eksploitasi ini harus memperkerjakan sejumlah besar orang pribumi sebagai pegawai rendahan yang murah untuk menjaga agar perkebunan pemerintah berjalan lancar. Pegawai ini, dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional yang menjamin keberhasilan perusahaan ini, harus diberi pendidikan. Untuk tujuan ini pada tahun 1848 untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial diberikan sejumlah f25.000,- untuk pendirian sekolah bagi anak bumiputera. Sekolah ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai orang bumiputera. Keputusan ini ternyata penting, karena inilah pertama kalinya uang pemerintah dipakai untuk pendidikan anak-anak bukan Kristen.

3. Politik Etis: (1900-1920)

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer, berjudul *Hutang Kehormatan* dalam majalah *De Gids*. Ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Tahun 1901, buah pikiran itu menggema dalam pidato raja Belanda.

Peristiwa itu dapat dipandang sebagai ekspresi ide yang baru yang kemudian dikenal sebagai Politik Ethis. Pendirian ini menentang politik eksploitasi materialistis pada masa silam dan harus menggantikan sikap *laissez faire* liberalism dengan mengadakan intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi. Politik ini menonjolkan kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas.

Van Deventer menganjurkan program yang ambisius untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ia ingin memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, transmigrasi dari pulau Jawa yang terlalu padat penduduknya. Semua usaha perbaikan itu akan sia-sia tanpa pendidikan massa. Pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara berangsur-angsur itulah inti politik etnis. Tujuan politik etnis dapat disimpulkan sebagai usaha mencapai kesejahteraan melalui irigasi, transmigrasi,

reformasi, pendewasaan, perwakilan, dan dalam semua pendidikan memainkan peranan penting.

Van Deventer juga mengembangkan pengajaran bahasa Belanda karena dilihatnya bahwa mereka yang menguasai bahasa Belanda secara cultural lebih maju dan dapat menjadi pelopor bagi yang lain. Bahasa Belanda dimasukkan sebagai pelajaran di beberapa Sekolah Kelas Satu dan sejumlah kursus dibuka dengan maksud itu, tetapi bahasa Belanda tidak kunjung menjadi bahasa rakyat. Orang Belanda sendiri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaannya kepada orang Indonesia, sebagian karena tidak ingin mengganggu adat kebiasaan Indonesia, akan tetapi juga karena takut jika orang pribumi merasa dirinya sama setelah mereka menguasai kebudayaan, pengetahuan, teknik, dan organisasi Barat.

Snouck Hurgronje yang menyadari bahaya Pan Islamisme mendesak agar orang Indonesia dipengaruhi ke arah lain dengan menyajikan pendidikan Barat agar mereka menjauhi jalan islamisme dengan asosiasi dengan Belanda. Walaupun pada tahun 1890 jumlah pesantren dan langgar bertambah, dua puluh tahun kemudian sekolah Belanda menjadi lembaga pendidikan yang lebih populer.

Sejak dijalankannya politik etis, tampak kemajuan dalam bidang pendidikan daripada sebelumnya. Jumlah sekolah rendah meningkat cepat, sekolah-sekolah berorientasi Barat diciptakan baik bagi orang Cina maupun orang Indonesia. Pendidikan juga berkembang secara vertikal dengan didirikannya MULO dan AMS yang lebih terbuka bagi anak-anak Indonesia daripada HBS, dan menjadi pintu masuk ke universitas. Selama periode inilah akhirnya sistem pendidikan mencapai kelengkapannya.

Politik etis dalam arti yang murni sesungguhnya tidak berlangsung lama dan hanya dilaksanakan oleh segelintir orang. Pendidikan yang baik tetap terbatas pada golongan atas. Untuk rakyat banyak pendidikan dijaga agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana, hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik.

Namun demikian, walaupun terbatas pada golongan kecil dan dimaksudkan untuk menghasilkan pegawai, menimbulkan elite intelektual baru, banyak sedikit menjadi asing terhadap kebudayaan tradisional. Namun elite ini menjadi juru bicara nasionalisme Indonesia yang anti Barat. Pendidikan yang seharusnya mendekatkan bangsa Belanda dan Indonesia, dalam kenyataan menjauhkan mereka.

4. Ciri Umum Politik Pendidikan Belanda

- a. Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia;

Pemerintah Belanda yang menggantikan VOC yang terpengaruh oleh pikiran liberalism mengakui kebutuhan pendidikan bagi anak Belanda. Akan tetapi bagi anak-anak Indonesia tidak dilakukan selama bagian pertama abad ke-19 walaupun banyak dikeluarkan peraturan-peraturan yang mengandung janji-janji serta tekanan pada kewajiban Gubernur Jenderal agar juga memajukan pendidikan bagi pribumi.

Perhatian banyak diberikan kepada pendidikan anak Belanda. Pada tahun 1902 hanya seorang di antara 523 orang di Jawa yang bersekolah, akan tetapi bagi orang Belanda satu di antara $4 \frac{3}{4}$ orang menjadi murid di Hindia Belanda dibandingkan dengan satu di antara $6 \frac{1}{4}$ orang di negeri Belanda. Pada tahun 1900 hanya seorang di antara 35-36.000 orang di Indonesia yang tamat sekolah rendah pemerintah atau kira-kira sama dengan persentase anak Belanda yang lulus HBS di Belanda.

Anak-anak Belanda telah dapat memasuki pendidikan menengah sejak 1860, sedangkan pendidikan lanjutan bagi anak Indonesia baru disediakan pada tahun 1914. Sekolah menengah sebagai lanjutan sekolah rendah berbahasa Melayu tidak kunjung diwujudkan selama penjajahan kolonial. Untuk pendidikan tinggi, Hindia Belanda dianggap tidak matang karena tidak ada masyarakat ilmiahnya.

Ada berbagai alasan mengapa pendidikan untuk orang Indonesia sangat lambat perkembangannya. Pendidikan bagi jutaan murid akan memakan biaya jutaan yang tidak dapat atau tidak rela dikorbankan oleh pemerintah Belanda. Keberatan terhadap perkembangan pendidikan yang cepat akan menelan banyak dari keuntungan. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk pendidikan hanya 5-10% dari apa yang dikeluarkan Filipina. Rata-rata f 33,75 per tahun dikeluarkan untuk tiap anak Belanda sedangkan untuk anak Indonesia hanya 4,5 sen per orang.

Alasan lain pendidikan bagi anak Indonesia lambat berkembang ialah bahwa urusan penduduk selama ini diserahkan kepada raja masing-masing dengan alasan orang Belanda tidak ingin mengganggu adat istiadat setempat. Walaupun diberi dorongan oleh beberapa Gubernur Jenderal, namun raja-raja setempat tidak dapat berbuat banyak dalam bidang pendidikan. Sebaliknya, penduduk sendiri tidak

menunjukkan banyak perhatian akan pendidikan yang diberikan oleh orang Belanda. Bahkan golongan ningrat juga curiga akan usaha pemerintah Belanda untuk mendidik anak mereka menurut cara Barat. Baru kemudian pada abad ke-20 pendidikan, khususnya pendidikan Barat menjadi suatu yang berharga sebagai kunci menjadi pegawai pemerintah dan untuk melanjutkan pelajaran. Maka desakan mendapatkan pendidikan menjadi demikian kuat, sehingga pemerintah tidak dapat lagi menunda perkembangan sistem pendidikan yang memungkinkan anak Indonesia mencapai perkembangan yang setinggi-tingginya.

Adanya dorongan konservatif di kalangan orang Belanda untuk mempertahankan *satus quo* juga ikut berpengaruh. Sering terjadi ide progresif yang dicetuskan dan diinstruksikan oleh Den Haag sangat lamban atau sama sekali tidak dilaksanakan. Bahkan Gubernur Jenderal sendiri sering tidak kuasa untuk memajukan perkembangan. Gradualisme juga menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi orang Belanda. Membatasi kesempatan belajar bagi orang Indonesia antara lain berfungsi menjaga agar anak Belanda selalu lebih maju.

Banyak pula yang menganggap pendidikan yang terlampau maju dari penduduk akan menjadi bahaya bagi pemerintah Belanda. Colijn, seorang politikus Belanda terkemuka sebelum Perang Dunia II menganggap bahwa “keinginan yang tak layak di kalangan banyak orang Jawa untuk memperoleh pendidikan lanjutan adalah bahaya besar bagi rencana-rencana pemerintah”. Member pendidikan tanpa jaminan pekerjaan hanya memupuk elit intelektual yang mengalami frustrasi dan merupakan ancaman bagi pemerintah Belanda. Pendidikan Belanda, khususnya pendidikan menengah harus dikurangi setidaknya-tidaknya sampai batas kemampuan ekonomi kolonial untuk menyerap semua yang telah terdidik. Ada pula rasa takut kalau-kalau orang Indonesia, yang menguasai bahasa Belanda, akan merasa dirinya sama dengan orang Belanda dan menantang superioritas bangsa kulit putih.

Alasan itu menyebabkan perkembangan pendidikan bagi anak Indonesia sangat lamban. Juga pada masa kemudian, setelah anak Indonesia mendapat kesempatan memasuki sekolah menengah dan perguruan tinggi, jumlah pelajar Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan anak Belanda bahkan anak Cina.

- b. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi;

Maksud dualism di sini, sekolah dibuat berbeda untuk berbagai golongan rasial dan sosial. Sistem pendidikan terbagi dalam dua kategori yang jelas. Sekolah Belanda dan sekolah pribumi, masing-masing dengan inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, dan pembiayaan tersendiri. Dasar pembagian ini tidak rasial tapi linguistic. Sekolah berorientasi Barat diselenggarakan dalam Bahasa Belanda, sedangkan sekolah untuk pribumi dalam bahasa Melayu atau Bahasa Daerah. Sekolah Belanda selama hamper seabad membuka kesempatan satu-satunya untuk pendidikan lanjutan. Pendidikan pribumi bisa dikatakan tidak memberi kesempatan meneruskan pelajaran dan merupakan jalan buntu.

Cirri dualism yang lain terdapat dalam pendidikan bagi anak Belanda dan anak Indonesia. Anak Belanda dari golongan sosial tinggi memasuki sekolah Belanda (ELS) kelas satu, sedangkan anak-anak Belanda golongan rendah memasuki sekolah Belanda (ELS) bukan kelas satu. Deferensiasi semacam ini juga terdapat di kalangan pendidikan bagi anak Indonesia. Anak-anak desa memasuki Sekolah Desa dan mereka yang tinggal di kota serta pusat perdagangan dan industry memasuki Sekolah Kelas Dua.

Alas an dualism ini menurut Kat Angelino dalam bukunya *Koloniale Politiek* (Politik Kolonial), dualism ini didasarkan atas kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai golongan penduduk Hindia Belanda. Karena lingkungan anak Belanda berbeda dengan anak pribumi, maka sekolah pun harus berbeda untuk masing-masing golongan.

Namun rasanya tidak mungkin menjelaskan dualism ini lepas dari pertimbangan rasial. Orang Indonesia yang bukan Belanda diharuskan membayar uang sekolah yang lebih tinggi daripada orang Belanda yang mempunyai penghasilan yang sama. Selanjutnya sekolah berbahasa Belanda dibagi dalam tiga tipe, yakni sekolah untuk anak Belanda (ELS), Indonesia (HIS), dan Cina (HCS), walaupun kurikulum HCS persis sama dengan kurikulum ELS tanpa penyesuaian dengan kebudayaan Cina. Sejak 1816 sekolah satu-satunya di Jawa adalah sekolah untuk anak-anak Belanda dan setelah sekolah dibuka bagi anak Indonesia pada tahun 1848 lahirlah dualism. Pada tahun 1864, J.A. Van der Chys ditunjuk sebagai ispektur pertama untuk pengajaran pribumi.

Dualisme dapat dilihat sebagai konsekuensi kenyataan adanya berbagai bangsa yang hidup bersama dalam hubungan kolonial dengan hak yang berbeda-beda, orang Belanda sebagai penjajah, penguasa dan pemberi pekerjaan dan orang

Indonesia sebagai yang terjajah, buruh dan pekerja. Orang Belanda mempertahankan status kolonial ini sampai akhir masa penjajahan. Superioritas rasial merupakan alat untuk mengamankan orang Belanda terhadap orang Indonesia yang terdidik yang kian hari kian bertambah jumlahnya yang menjadi ancaman terhadap kedudukan mereka yang istimewa itu.

Lambat laun mulai terdengar suara-suara yang menentang prinsip dualism dalam pendidikan. ketua kongres pendidikan (1919) mengajukan pertanyaan apakah masih ada maknanya mendasarkan pendidikan atas perbedaan rasial dan sosial. Menurut pendapatnya, pendidikan seharusnya hanya didasarkan atas kemampuan individual untuk menjamin kerjasama yang permanen antara berbagai bangsa.

Dualism ini baru lenyap setelah pendudukan Jepang, namun kolonialisme, dalam hal ini kolonialisme Jepang, dapat kembali mengembangkan dualism atas dasar rasa superioritas bangsa Jepang. Unifikasi pendidikan akhirnya baru tercapai setelah kemerdekaan Indonesia yang memberikan kesempatan yang sama melalui saluran yang sama untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya.

c. Kontrol sentral yang kuat;

Pemerintah memainkan peranan penting dalam segala masalah pendidikan. tak ada perubahan, betapapun kecilnya, tanpa persetujuan Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama atasannya. Pemerintah Hindia Belanda berada di bawah control Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahannya atas nama raja yang diwakili oleh Menteri Jajahan. Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja atas usul Dewan Menteri, khususnya menteri jajahan, oleh karena itu harus mempertanggungjawabkan tindakan Gubernur Jenderal di hadapan Parlemen.

Sampai 1918 segala masalah pendidikan diputuskan hanya oleh pegawai Belanda saja tanpa konsultasi dengan orang Indonesia, akan tetapi dengan didirikannya Volksraad, maka orang Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah memperoleh kesempatan untuk secara resmi mengemukakan pendapatnya dan dengan sendirinya mulai mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Volksraad memegang peranan aktif dalam pembicaraan tentang peraturan-peraturan, akan tetapi keputusan akhir ada di tangan Gubernur Jenderal. Oleh karena itu, Volksraad bukan badan legislative dalam arti sebenarnya, namun member kesempatan kepada orang Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang berbagai macam soal, termasuk pendidikan.

Oleh karenanya, pendidikan dikontrol secara sentral, guru-guru dan orangtua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam politik pendidikan. segala sesuatu mengenai sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah, pengangkatan guru, ditentukan oleh pemerintah pusat.

- d. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai factor penting dalam perkembangan pendidikan;

Sekolah pertama untuk anak Indonesia didirikan oleh pemerintah dengan tujuan mendidik anak-anak aristokrasi di Jawa untuk menjadi pegawai di perkebunan pemerintah yang senantiasa berkembang selama masa Tanam Paksa. Pemerintah akhirnya melibatkan diri dengan pendidikan orang Indonesia hanya karena terpaksa.

Tahun 1864, ditetapkan *Klein Ambtenaars Examen*, ujian pegawai rendah yang harus ditempuh dengan baik agar seorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Pekerjaan administrasi yang sebelumnya lapangan kerja orang Belanda kemudian terbuka bagi orang Indonesia. Selama 50 tahun berikutnya ELS lah satu-satunya lembaga yang memberi persiapan untuk ujian itu. Ijasah pegawai rendah selama waktu yang panjang merupakan factor penting dalam program sekolah rendah. Sekolah khusus seperti sekolah untuk anak-anak raja yang semula dimaksud untuk member pendidikan umum, direorganisasi pada tahun 1900 dan diberi nama OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambttenaren*) atau sekolah untuk pegawai pribumi karena lulusannya akhirnya menjadi pegawai. Pendidikan untuk pegawai tinggi khusus untuk orang Belanda dipusatkan di akademi Delft, di Utrecht, tapi sejak 1863 Gymnasium Wilem III juga mempunyai suatu program untuk latihan yang demikian.

Perluasan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan juru tulis yang meningkat. Karena kebutuhan akan pegawai administrasi yang murah oleh pemerintah dan perusahaan swasta maka pendidikan Barat makin terbuka bagi orang Indonesia. Kemajuan ekonomi disertai perkembangan pendidikan dan depresi ekonomi membawa kemunduran pendidikan. Dirasakan bahwa kebutuhan pemerintah akan pegawai harus dijadikan ukuran yang wajar bagi jumlah sekolah yang akan didirikan dan juga sifat dan luas apa yang diajarkan.

Kebutuhan pegawai yang mempunyai pendidikan lebih baik menyebabkan perluasan vertical sistem pendidikan. ide pendidikan ssebagai produksi pegawai demikian kuatnya sehingga HIOC (*Hollands Inlandsch Onderwijs Commiissie*)

atau Komisi Sekolah Belanda untuk pribumi pada tahun 1927 menganjurkan agar jumlah HIS yang sangat populer itu dikurangi.

Kedudukan sebagai pegawai pemerintah sangat dihargai pada jaman kolonial yang birokratis. Pegawai pemerintah adalah pendukung otoritas kekuasaan pemerintah Belanda. Kebanyakan orang Belanda (65%) dipekerjakan oleh pemerintah.

Di luar pemerintah dan dunia perusahaan Barat, tak banyak pekerjaan terbuka bagi orang Indonesia yang berpendidikan. Unsur kewiraswastaan hampir seluruhnya dilenyapkan oleh monopoli pemerintah. Perdagangan dan pertukangan hampir seluruhnya dalam tangan orang Cina. Orang Indonesia dengan sikap priayinya tidak memiliki semangat berusaha. Hanya sebagian kecil dari lulusan HIS yang sanggup berusaha sendiri. Lebih dari 80% dipekerjakan oleh pemerintah dan perusahaan Barat yang besar. Buruh kasar sangat kecil upahnya dan rendah kedudukannya dalam pandangan masyarakat.

Industri tidak berkembang di Indonesia untuk melindungi pabrik-pabrik di negeri Belanda dan kepentingan perkebunan dan eksportir. Idenburg menganjurkan pada tahun 1902 untuk membangkitkan industri pribumi dengan modal pribumi dan melatih orang Indonesia untuk pengembangan industri. Tapi dalam masyarakat Indonesia tidak diperlukan tenaga yang terampil. Pekerjaan yang tak berdeferensiasi di desa, yang kebanyakan dilakukan secara gotong royong, tidak memberi tempat bagi tenaga yang memiliki ketrampilan khusus. Di kota-kota, orang Cina memonopoli aspek ekonomi, sedangkan pabrik Barat hanya mempekerjakan lulusan sekolah teknik menengah, khusus untuk anak-anak Belanda.

- e. Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda;

Prinsip ini bertujuan menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Hal ini untuk mempermudah perpindahan murid-murid dari Hindia Belanda ke sekolah-sekolah di negeri Belanda.

Sekolah-sekolah pertama semula dimaksud khusus untuk anak-anak Belanda di Hindia Belanda. Akan tetapi karena banyak orang Belanda, terutama yang kaya dan pegawai pemerintah kembali ke negeri Belanda untuk perlop atau pension maka perlu dimungkinkan perpindahan murid setiap waktu. Oleh karena itu yang ideal adalah membuat sekolah Belanda di Hindia Belanda sama dalam segala hal

dengan yang di negeri Belanda. Inspektur ditugaskan untuk mengusahakan agar sekolah-sekolah mencapai mutu yang sama dengan yang di negeri Belanda. Untuk mencapai tujuan ini sekolah-sekolah Belanda baik sekolah rendah maupun menengah mengikuti kurikulum yang sama, mempekerjakan guru dengan kualifikasi yang sama seperti di negeri Belanda. Sebenarnya negeri Belanda sendiri tidak mempunyai kurikulum yang uniform karena sekolah-sekolah berada di bawah pengawasan kotapraja. Namun demikian banyak persamaan program sekolah.

Sekolah-sekolah Belanda di Indonesia berhasil dalam mencapai standar seperti di negeri Belanda dan anak dari Indonesia tidak menemui lebih banyak kesulitan di negeri Belanda dibanding dengan anak pindah sekolah di negeri itu sendiri. Ini berlaku bagi sekolah rendah maupun menengah. Karena prinsip konkordansi ini, lulusan HBS di Indonesia tidak menemui kesulitan untuk memasuki universitas di negeri Belanda.

Prinsip konkordansi menjadi masalah setelah semakin banyak anak-anak Indonesia dan Cina memasuki ELS. Kelayakan prinsip ini juga dipersoalkan karena menurut kenyataan kira-kira 90% dari anak-anak ELS tidak akan pergi ke negeri Belanda. Prinsip konkordansi menyebabkan kurikulum ELS tidak mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan keadaan khas di Indonesia. Walaupun berdiri di bumi Indonesia, ELS semata-mata berorientasi pada Belanda dan sepenuhnya dipusatkan pada kondisi Belanda, dengan sama sekali mengabaikan kebudayaan Indonesia, Bahasa Melayu, bahasa yang paling populer di Indonesia tak pernah merupakan bagian dari kurikulum. Sebaliknya bahasa Prancis yang tidak mempunyai nilai fungsional dalam masyarakat Indonesia dianggap mata pelajaran yang cukup penting.

Untuk kebutuhan orang Cina dan Indonesia akan pendidikan Barat, diciptakan HCS (*Hollands Chinese School*). Kurikulum sekolah-sekolah ini juga dipengaruhi prinsip konkordansi. HCS mempunyai kurikulum yang sama persis dengan ELS. Walaupun tidak sampai batas yang sama, HIS juga tidak bebas dari pengaruh prinsip konkordansi itu. Kurikulumnya sedikit banyak berorientasi pada Belanda. Bahasa pengantar sejak mulanya bahasa Belanda dan standar akademis yang dicapai harus sama dengan ELS. Namun transfer dari HIS ke ELS tidak mungkin dan lulusan HIS tidak dapat diterima di HBS.

- f. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.

Sekitar tahun 1910 terdapat berbagai macam sekolah rendah bagi anak-anak Indonesia Indonesia seperti Sekolah Desa untuk anak-anak di daerah pedesaan, Sekolah Kelas Dua untuk anak orang biasa di kota-kota, sekolah kelas satu untuk anak-anak kaum ningrat dan golongan kaya, sekolah khusus untuk anak militer, juga untuk golongan aristokrasi di Sumatera, dan di samping itu sejumlah sekolah untuk pendidikan pegawai dan dokter Jawa. Ciri khas dari sekolah-sekolah ini adalah masing-masing berdiri sendiri tanpa hubungan organisasi antara yang satu dengan yang lain dan tanpa jalan untuk melanjutkannya. Sekolah untuk pendidikan pegawai hanya dapat dimasuki melalui ELS. Sebaliknya untuk anak-anak Belanda telah ada sejak 1860 suatu sistem pendidikan yang mempunyai organisasi yang lengkap sama dengan di negeri Belanda yang memungkinkan mereka memasuki universitas melalui sekolah rendah dan menengah yang saling berhubungan erat.

Tidak adanya hubungan antar sekolah untuk anak pribumi mulai disadari setelah 1910. Gubernur Jenderal Idenburg mengirim surat pada waktu itu kepada Menteri Jajahan tentang rencananya untuk menyatukan sekolah yang lepas-lepas tersebut menjadu suatu kesatuan yang bulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib Suminto. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: Jembatan
- Ary H. Gunawan. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Beeby, C.E. (1982). *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta: LemLit Pendidikan&Penerangan Eko&Sos
- Dyah Kumalasari. (2007). Dinamika Pendidikan Indonesia Pada Masa Kolonial. *Jurnal Istorica*. Yogyakarta: Pendidikan Sejarah FISE UNY
- Djumhur, I. (1974). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: LSIK
- Mahmud Yunus. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Mansur, Dahlan, dan M.Said. (1989). *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: PT.Rajawali Press
- Muhammad Ngalim Purwanto. (2002). *Ilmu Pendidikan, Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. (2001). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soegiono. (1993). *Tokoh-Tokoh Pendidikan Dunia*. Jakarta: CV. Ilmu
- Syaifuddin Zuhri. (1978). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al ma'arif
- UU. No. 20 Tahun 2003
- Zuhairini, dkk. (1997). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara